



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Rabu, 30 Oktober 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara	:	1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI 2. Penjelasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai Visi dan Misi Presiden di Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Waktu	:	Pukul 13.58 s.d. 16.19 WIB
Ketua Rapat	:	Felly Estelita Runtuwene, S.E. (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
Sekretaris Rapat	:	Ida Nuryati, S.Sos., M.A. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir	:	A. PIMPINAN DAN ANGGOTA: 34 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E. (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)
3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Indah Kurnia, S.E., M.M.

2. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
3. Obet Rumburen
4. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

6 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, SH.
2. dr. Maharani
3. Ranny Fahd Arafiq
4. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
5. Ashraff Abu
6. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

5 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M
2. Ir. Sri Meliyana
3. Ir. H. Nuroji
4. Obon Tabroni
5. Hj. Mariana, SAB., MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
3. Nafa Urbach
4. Nurhadi

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Zainul Munasichin
2. Asep Romy Romaya
3. Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E.,
M.A.P

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si

3. Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
4. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
2. H.M. Muazzim Akbar, S.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. H. Zulfikar Achmad

B. UNDANGAN

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si. (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
2. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
3. Dzulfikar Ahmad Tawala, S.Pd., M.Ikom. (Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)
4. Rinardi, S.E., M.Sc. (Sekretaris Utama)
5. Suwedi, S.E., M.M. (Inspektur)
6. Drs. Lasro Simbolon, M.A. (Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika)
7. Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H. (Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik)
8. Irjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si. (Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Kita mulai, Bapak/Ibu, ayo. Kita mulai, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Bapak Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ibu Wakil Menteri, Ibu Christina Aryani, serta jajarannya. Yang kami hormati, Wakil Menteri, Bapak Dzulfikar Ahmad. Juga yang kami hormati, Bapak/Ibu Pimpinan Anggota Komisi IX DPR RI, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, tentu patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana kita diberikan lagi kesempatan boleh mengadakan rapat di Komisi IX. Sebelum rapat ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi IX DPR RI yang telah hadir berjumlah 32 dari 43 Anggota Komisi IX DPR RI, yang terdiri 8 fraksi dari 8 fraksi yang ada. Dengan demikian, kuorum, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi, serta dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.58 WIB)

Mengenai waktu, Bapak/Ibu, sekarang sudah pukul 13.59, kita sampai pukul 15.00 atau? Pukul 15.00 dulu, ya. Nanti kalau kurang kita akan perpanjang. Sampai pukul 15.00, ya.

(RAPAT: SETUJU)

Adapun agenda rapat pada hari ini adalah perkenalan dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan penjelasan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengenai visi dan misi presiden di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia. Sesuai agenda kita hari ini, yaitu perkenalan dan penjelasan mitra kerja, maka sebelum kami persilakan kepada Saudara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu Anggota Komisi IX.

Kami persilakan dari sebelah kiri saya untuk memperkenalkan diri dan dari dapil mana. Baris kedua kami persilakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, B.S., B.A., M.B.A.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati, beserta
Rekan-Rekan Komisi IX yang saya hormati.
Kepada Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Abdul
Kadir beserta jajaran,
Ibu Wamen, Ibu Christina beserta jajaran, dan juga
Pak Dzulfikar Ahmad, Bapak Wamen beserta jajaran,**

Perkenalkan, nama saya Sihar Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan saya, Daerah Pemilihan Sumatra Utara II meliputi 19 kota/kabupaten. Periode sebelumnya saya di Komisi XI.

Demikian dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Selanjutnya kami persilakan dari baris ketiga, Ibu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirramannirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Perkenalkan, nama saya Netty Prasetyani, nomor anggota A-460 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jabar VIII, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Wa'alaikumsalam.

Lanjut.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sri Meliyana, A-81, dari Fraksi Gerindra, Dapil Sumatra Selatan II.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Lanjut.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya Kurniasih Mufidayati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil DKI Jakarta II.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Lanjut, silakan.

F-P. DEMOKRAT (dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA, M.H.Kes.):

Iya, izin, Ketua.

Perkenalkan nama saya Cellica Nurrachadiana. Saya dari Dapil Jabar VII, Karawang, Purwakarta, Bekasi, dari Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Selanjutnya.

F-P. GERINDRA (ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Perkenalkan,

Pak Menteri, Bapak/Ibu Menteri, dan seluruh jajaran BP2MI, dan Kementerian Penempatan Migran Indonesia.

Nama saya Ade Rezki Pratama dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Sumatra Barat II. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Selanjutnya, kami persilakan dari sebelah kanan saya, mulai dari Pak Alifudin. Kami persilakan.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Perkenalkan nama saya Alifudin dari Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat I.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Selanjutnya.

F-PKB (ZAINUL MUNASICHIN, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Pimpinan.

Pak Menteri beserta dengan seluruh jajaran.

Izin memperkenalkan. Saya Zainul Munasichin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Menteri senyum-senyum, enggak enak saya. Langsung kena mental saya. Dari Dapil Jabar IV Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan.

F-P. GOLKAR (RANNY FAHD ARAFIQ):

Izin, Pimpinan.

Pak Menteri, Ibu Wamen, Bapak Wamen, dan para jajarannya.

Saya Ranny Fahd Arafiq dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Kota Depok, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya di baris kedua, kami persilakan Ibu kita (00:06:51).

F-P. GERINDRA (Hj. MARIANA, S.A.B., M.M.):

Iya, izin, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Hj. Mariana dari Fraksi Gerindra, Dapil Kalimantan Selatan II. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Selanjutnya.

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri beserta jajaran saya hormati,

Saya Teti Rohatiningsih dari Fraksi Golkar, Jateng VIII, Bayumas-Cilacap. *Matur nuwun.*

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Lanjut, Pak.

F-PAN (H.M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Muazzim Akbar, Dapil NTB, Pulau Lombok, basis PMI terbesar di Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya, baris ketiga.

F-PDI PERJUANGAN (OBET RUMBRUREN):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Obet Rumbruren, Fraksi PDI, Dapil Papua Barat. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, masih ada yang belum?

Selanjutnya di meja pimpinan sebelah kiri, mulai dari Ibu Nihayatul.

F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini senyum kedua, Mas Zainul.

Perkenalkan, Pak Menteri, Bu Wamen, Pak Wamen, jadi kayaknya yang mulai senyum-senyum, Pak, bukan Sestama lagi ya Pak, ya. Sesmen sudah, ya? Sudah bau-baunya ada anggaran naik kayaknya ini.

Saya Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya Dapil Jawa Timur III, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, lanjut.

F.P-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri beserta Ibu Wamen dan Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Saya drg. Putih Sari dari Fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihannya Karawang, Purwakarta, Bekasi. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Sebelah kanan saya, silakan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, Ibu Wamen, dan Pak Wamen beserta jajaran.

Saya Yahya Zaini dari Fraksi Partai Golkar, Dapil VIII Jawa Timur, Jombang dan sekitarnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Selanjutnya saya sendiri, Felly Estelita Runtuwene dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Fraksi NasDem. Kesempatan yang baik ini kami...

Masih ada, oh iya, Pak Heru silakan memperkenalkan diri.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Pimpinan. Saya Heru Tjahjono dari Jatim VI, dari Fraksi Golkar. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, Pak Asep.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA, S.E.):

Izin, Pimpinan.

Saya mengenalkan diri, saya Asep Romy Romaya, Daerah Pemilihan Jabar II, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dari Fraksi PKB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya, kesempatan yang baik ini kami persilakan Saudara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyampaikan paparannya didahului dengan perkenalan.

Kami persilakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik. Terima kasih, Ibu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.

Yang terhormat, Ketua Komisi dan Wakil Ketua, beserta seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati dan saya banggakan.

Wakil Menteri yang kami hormati dan Rekan-Rekan Eselon I, II yang berada berasal dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran yang kami hormati dan kami banggakan.

Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, tentu mari kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, *alhamdulillah*, pada sore hari ini atau siang menjelang sore hari ini kita semua untuk pertama kalinya dipertemukan secara formal. Kalau informal dari beberapa Anggota ini sudah cukup familiar, karena saya sendiri di DPR tiga periode, sehingga ada beberapa Bapak/Ibu sekalian yang relatif sudah sering berkomunikasi.

Yang kedua, tentu sebagai menteri baru, izinkan kami menyampaikan selamat kepada Bapak/Ibu Anggota dan Pimpinan, karena telah terpilih mewakili dapil masing-masing dan mudah-mudahan, nanti dengan kementerian ini bisa kita bekerja sama bermitra dengan baik, lebih khusus kepada seluruh Pimpinan. Selamat atas dipilihnya menjadi Pimpinan Komisi IX.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Biar tidak terlalu panjang, saya izin memperkenalkan diri. Saya namanya H. Abdul Kadir Karding. Ini kalau dulu dapil saya Dapil VI Jawa Tengah. Kalau sekarang, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi, saya masih kadang-kadang menganggap diri saya ini Anggota DPR.

Yang kedua, di sebelah saya ini Ibu Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. Beliau dari, kalau basis berangkatnya, dari Partai Golkar. Sebelah saya, Pak Dzulfikar Ahmad Tawala, aslinya Makassar. Beliau ini adalah Ketua PP Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah hari ini. Kemudian, Pak Rinardi ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi Ibu Nihaya terutama, sama Ibu Felly, ya, karena pimpinan komisi yang sama pada periode yang lalu, Sekretaris Utama, tapi *insyaallah* sebentar lagi akan jadi Sekjen, Sekjen.

Kemudian, Ibu Sri Andayani sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama. Berdiri ya, Bu, ya biar kelihatan. Itu Ibu Sri ini yang perencanaan. Kemudian, Ibu Hadi Wahyuningrum, Ibu Yuyu, Kepala Biro Hukum dan Humas. Bu Yuyu ini yang akhir-akhir ini kerja keras sama Pak Sekjen ini, karena nyusun SOTK sama anggaran baru ini harus kita susun ini.

Kemudian, Pak Indra Hardiansyah, Kepala Biro Umum. Kemudian, Pak Yusuf, PLT Kepala Biro SDM. Oh, penerimaan CPNS baru, iya izin, Ibu Ketua. Kemudian, Pak Suwedi, oh lagi ini ya lagi ada pemeriksaan dari Inspektorat. Kemudian, Firdaus Zazali. Kemudian, Devriël Sogia. Kemudian, Drs. Lasro

Simbolon, Deputi Bidang Penempatan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika. Kemudian, Seriulina Tarigan, S.E. Ini lidah Bugis, ngomong Medannya susah.

Kemudian, Pak Sukarman, Pak Sukarman ini adalah Direktur Sistem dan Strategi Penempatan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika. Pak Mocharom Ashadi, S.Ag. Ya, yang mana Pak Mocharom ini? Pak Mocharom ini adalah Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika.

Kemudian, Kombes. Pol. Dr. Iswantonno M.M., Pak Kombes. Kemudian beliau adalah Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika. Agustinus Gatot Hermawan S.H., M.H., Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik. Kemudian, Dra. Lizmia Elita M.M, ini beliau adalah Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik. Drs. Dwi Anto, M.Si. Oh lagi dioperasi, Bu, lagi sakit. Izin, Bu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Yang ada aja, Pak.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Kemudian, Dr. Servulus Bobo Riti, S.Pd., M.M. dari NTT, nanti Tuhan tolong. Servulus. Kemudian Irjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si, mana Pak Ketut? Ini Pak Ketut. Beliau ini adalah Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa Timur Tengah. Pak Ahnas, S.Ag., M.Si., Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa Timur Tengah. Mana Pak Ahnas?

Kemudian Dra. Dyah Rejekiningrum, M.M. Oh, Bu Diah. Ini Bu Diah ini adalah Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Brigjen. Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, S.I.K., M.H., M.Han. Beliau adalah Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan beserta tim lain yang tidak dapat kami perkenalkan satu per satu, nanti habis waktunya, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik. Izin lanjut, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, waktu Bapak 20 menit untuk pemaparan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Oke.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Kami persilakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pada prinsipnya, bahwa kementerian ini adalah kementerian baru yang merupakan peningkatan *maqom* atau derajat dari badan menjadi kementerian, dan ini tentu tidak lepas dari perjuangan dari teman-teman Komisi IX periode tahun lalu. Kami tahu banyak aktivis-aktivis buruh dan pekerja migran yang ada di Komisi IX yang begitu getol agar pemerintah ke depan itu adalah fokus pada kerja-kerja perlindungan terhadap pekerja migran kita.

Alhamdulillah, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden, *alhamdulillah* ternyata gayung bersambut. Beliau dengan komitmen dan *political will*-nya, kemudian mendorong agar terbentuk apa yang disebut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ketika saya diundang oleh Pak Prabowo ke Kertanegara, sebelum dilantik jadi menteri, kami sempat berdiskusi sebentar. Beliau memesankan dua hal kepada kami. Yang pertama, "Pak Kardi tolong fokus pada perlindungan, jangan sampai ada eksploitasi terhadap pekerja migran kita." Saya, terus terang, di kepala saya agak pusing itu, karena kan yang bisa kita kontrol sebenarnya hanya yang masuk ke sisko kita, sistem kita. Artinya berangkat secara prosedural, legal, tapi yang di luar itu pasti tidak bisa kita kontrol, tetapi faktanya adalah mereka juga nanti mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi tanggung jawab perlindungan kita semua.

Jadi, ini mungkin PR untuk kita ke depan, cari cara bagaimana supaya masalah ini bisa kita atasi. Kan tidak mungkin kami prioritaskan yang daftar sama enggak daftar, ini soal kemanusiaan. Sementara, jumlah yang tidak prosedural jauh lebih besar daripada yang prosedural. Jadi, itu pesan, salah satu pesan Pak Prabowo kepada kami.

Yang kedua, “Tolong nanti devisanya ditingkatkan, ya, Pak, tetapi yang terampil, yang pekerjaannya yang manusiawi.” Nah, ini, dua ini lalu kami terjemahkan ke dalam beberapa isu strategis maupun kegiatan-kegiatan yang menurut kami setelah melakukan belanja masalah, ini mudah-mudahan nanti Bapak/Ibu di Komisi IX ini setuju, bahkan bisa jadi juga kami sangat terbuka ditambahkan nanti poin-poin, yang kira-kira apa yang belum ter-cover dari berpikir kami, yang baru saja dilantik beberapa hari ini.

Jadi, nah, dalam undangan yang disampaikan kepada kami, bahwa turunan dari visi-misi presiden, oleh karena itu, dasar kita melakukan transformasi. Jadi transformasi dari badan ke kementerian. Yang pertama adalah Perpres 139 Tahun 2024, ini tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih 2024-2029, ini perpres yang mendasari kami sekarang ini. Yang kedua adalah Perpres Nomor 140 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Jadi, Ibu Ketua dan Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan dan Ibu sekalian, kita akan membagi kepada 3 hal. Yang pertama itu soal kelembagaan, yang kedua soal perlindungan, dan yang ketiga adalah soal pelayanan dan penempatan. Dalam konteks transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi Kementerian BP2MI, ada beberapa hal yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan.

Yang pertama, kita harus melakukan penataan regulasi terkait perubahan fungsi, kewenangan, kelembagaan perlindungan PMI. Ini otomatis, karena meningkat jadi kementerian, ini otomatis kita lakukan. Nah, sekarang ini kami sedang, karena ditarget oleh Men-PANRB dan Menteri Keuangan, kalau tidak salah tanggal 7 itu sudah harus pengangkatan pejabat-pejabat baru untuk yang definitif duduk di kementerian baru ini. Jadi, sudah harus ada peraturan menteri untuk pejabat-pejabat baru.

Artinya, SOTK-nya sudah harus jadi. Nah, kami sekarang sih sedang proses mengawal SOTK. Dari Kementerian PANRB ada 4 Eselon I sekelas Dirjen, tambah 1 Sekjen, 1 Irjen. Sisanya itu nanti, terserah Menpan-RB mau dikasih direktorat apapun, tapi kita usulkan ke mereka kemarin, dan sudah kita sampaikan kemarin ke sana.

Yang ketiga, tadi penyusunan SOTK sudah kami sampaikan. Yang ketiga adalah peralihan layanan pencari kerja luar negeri dan CPMI yang dikelola oleh Kemenaker. Jadi, ini kan ada beberapa kewenangan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, terutama di Direktorat Bina Penempatan PMI ini. Nah, di sini ada 70, sekitar 70 pegawai. Memang kalau di publik, teman-teman Naker ngomongnya begini, “Yang berpindah adalah fungsi dan regulasinya. Orangnya enggak berpindah.” Ini PR untuk saya ini, Bu Ketua. Kalau enggak ada orang, berarti saya harus menyiapkan orang. Nah, nanti mungkin saya akan ngomong terbatas kepada para Anggota dan Ibu-Ibu sekalian, apa kelebihan dan kelemahan kalau ini tidak dikasih jalan keluar.

Yang keempat, peningkatan kompetensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja CPMI. Jadi, dalam Undang-Undang 18 2017, itu pemerintah pusat diberi kewenangan untuk melakukan pelatihan dan pendidikan. Itu, kalau tidak salah, di Pasal 39 ayat (o). Nah, jadi kementerian ini nanti mengorganisir penyiapan peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan dan vokasi pendidikan dan pelatihan.

Jadi, dalam pemahaman kami, kenapa banyak orang dieksploitasi, salah satunya karena mereka tidak terampil, salah satunya karena mereka tidak paham bahasa, salah satunya karena mereka tidak terlalu paham budaya. Jadi, kalau kita bisa menyelesaikan yang kita kirim ini terampil, paham bahasa, *insyaallah* 50% masalah perlindungan sebenarnya selesai.

Jadi, tahapan pra, penempatan, dan reintegrasi kuncinya salah satunya adalah di pendidikan dan pelatihan ini. Nanti banyak turunannya. Banyak turunannya pendidikan pelatihan ini, karena biayanya juga mahal, calonya juga kadang-kadang banyak. Jadi orang daftar ini. Orang daftar harusnya berangkat cuma bayar 30 juta, jadi 60 juta, jadi 90 juta, ini nanti kita urai bersama. Kita harus cari jalan keluarnya yang bisa kita eksekusi sehingga...

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Saya kira, Pak Menteri mesti fokus aja dengan apa tupoksi BP Kementerian Anda, Kementerian Saudara hari ini. Kemudian beri kami penjelasan apa saja yang diubah, apa saja yang masuk ke dalam perpindahan yang dari Kemenaker ke tempat Saudara, sehingga kami tahu. Kalau yang Saudara sampaikan kepada kami itu sudah makanan kami hari-hari.

Jadi, kami minta, tolong jabarkan aja program kerja 100 hari saudara apa. Ya, kemudian apa saja yang pindah, dari dirjen yang pindah itu apa saja, itu kita perlu tahu. Kalau yang saudara sampaikan tadi, salah satu, salah dua, salah tiga. Salah tiga, bukan salah satu. Salah satu, salah dua, salah tiga. Tiga yang salah itu. Pendidikan, yang disampaikan tadi. Ya, menurut saya itu dulu. Jadi, kita paham. Kalau bapak ngomongnya seperti tadi, itu udah makanan kita, Pak, hari-hari, Pak.

Jadi, saya berharap, fokus aja. Tupoksi Anda, Saudara apa, kemudian perubahan dari BP2MI ke kementerian apa, dirjen apa yang masuk ke tempat Saudara, sehingga kami paham, Pak. Nah, setelah itu baru kita elaborasi. Itu aja yang ingin kita dengar dulu, ya. Kalau gitu nanti kita masuk ke pendalaman, lo, ya. Kalau nanti kita masuk ke pendalaman, nanti pasti ribet lagi, karena yakin saya, karena saudara belum pernah di situ, berada di BP2MI, pasti nanti akan ribet juga nanti jawabnya.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Jawab, Bu, ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Lanjut, Pak Menteri, sekalian visi-misinya.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Jadi, saya ini bicara atas nama undangan. Undangannya satu perkenalan, yang kedua jabaran visi-misi presiden. Ya, jadi, jadi, ini yang coba saya jabarkan, tapi kalau Bu Irma, Kakak Irma...

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Sorry, Pak Menteri. Bukan, bukan hanya saya, semua kita mau dengar, Pak. Jadi, dirjen yang pindah itu apa, kan, Pak? Kemudian kita tahu, Pak, gitu lo.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Iya, iya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Kemudian, kerja 100 hari yang akan dilakukan apa. Itu lebih baik menurut saya, Pak. Jadi, kami perlu itu, sehingga nanti fokus, Pak.

Terima kasih, Kakak Karding.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Iya, iya.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Pak Menteri, bisa ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Pak Ashabul, silakan.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, saya kira, itu yang kami tunggu, Ibu/Bapak. Karena begini, ini peralihan TKI ke PMI itu kan sudah 7 tahun. Kemudian, sekarang PMI berubah lagi jadi kementerian. Ya, kita mau tahu sebenarnya, apakah kementerian ini, meskipun umurnya baru sebulan lah, ya, baru seminggu, sudah pernah melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada di PMI ini?

Tadi Bapak sudah sempat menyinggung menyangkut masalah tenaga kerja ilegal, yang ternyata itu jumlahnya jauh lebih besar daripada tenaga ilegal, tapi apa pun juga, karena tanggung jawab negara, perintah undang-undang, mau legal, mau tidak legal, ya, pemerintah harus turun tangan ketika membuka masalah.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Belum waktunya pendalaman, Pak.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Eenggak bertanya, saya, cuma maksud saya, yang itu yang kami tunggu melalui kesempatan ini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Pak, jadi, mungkin apa yang diminta, sekaligus karena ini ada nomenklaturnya, ada perubahannya dari badan jadi menteri, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu yang disampaikan oleh Ibu Irma. Kemudian, baru masuk ke visi dan misi presiden, seperti apa yang akan dilaksanakan dibuat oleh Pak Menteri sendiri. Mungkin itu.

Silakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik. Terima kasih, Ketua.

Pertama dari Kak Irma dan sama saya kiranya dengan Pak...

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Pak Ashabul.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pak Ashabul Kahfi. Jadi, Pak, yang pindah ini hanya satu direktorat, yaitu Direktorat Bina Tenaga Kerja Luar Negeri, yang secara tugas-fungsi dia berpindah ke kementerian baru. Yang lainnya tetap, kami dapat SOTK, draf SOTK dari Men-PANRB itu kami dapat empat dirjen, yang sebelumnya deputi, tiga deputi. Sekarang kita dapat empat dirjen, yang pertama adalah Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri. Ini saya perlu ulang biar jelas, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri. Yang kedua adalah Dirjen Penempatan. Jadi, ada promosi dan pemanfaatannya, ada penempatannya.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Pak Menteri, ini strukturnya enggak ada di *file* yang kita terima, ya?

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Ini memang kita enggak buat ke sini karena permintaannya bukan ini sebenarnya di suratnya Bapak/Ibu sekalian dan kita masih menunggu *acc* dari Men-PAN.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Mohon maaf, Pak Menteri.

Ya, kita paham Pak, karena semua menteri juga kita rapat bukan yang pertama. Mohon izin, Bu Menteri, ini sudah rapatnya kesekian kalinya, walaupun masih draf, tapi kita tuh punya gambaran gitu, lo. Jadi susunannya kayak apa tuh punya gambaran. Semua juga menyampaikan kok dari kemarin rapat. Rapat dengan mitra bukan hari ini, tapi sudah dari kemarin, Pak Menteri. Semua menyampaikan draf STOK-nya. Jadi, kita tahu, bisa *support* juga. Ini kan rapat ini kan tujuannya untuk men-*support* kementerian ini, Pak. Kalau kita enggak tahu, enggak punya pegangan, kan kita agak susah juga ini, ngebayanginnya tuh enggak kebayang gitu, lo.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Nanti saya...

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Saya lanjut dulu, ya. Saya lanjut dulu, ya, nanti dibagikan aja ininya, kita bagikan *copy*-nya kita bagikan. Jadi, sampai pada direktoratnya, nanti kita bagi ke Ibu, habis ini ya, lagi di-*print* ini. Karena, terus terang, memang teman-teman tidak menyiapkan itu secara fokus, tapi kita memang pikiran kita tadi berangkat ke sini harapannya kita mem-*breakdown* visi-misi presiden itu.

Yang ketiga adalah Dirjen Pelindungan. Jadi, penempatan, pelindungan, dan yang keempat, Dirjen Pemberdayaan. Di luar itu, ada Sekjen dan Irjen. Itu yang dari Men-PANRB. Jadi, berpindah Direktorat Bina Tenaga Kerja Luar Negeri, yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pasukannya 70 orang. Dirjennya, saya ulang, Promosi, Pemanfaatan, dan Peluang Kerja; Penempatan; Pelindungan; dan Pemberdayaan. Jadi ada 4 Dirjen, 1 Sekjen, dan 1 Irjen.

Selanjutnya, kita diberi kesempatan untuk menyusun atau mengusulkan direktorat. Kita diberi kesempatan untuk mengusulkan direktorat. Kami sedang proses pengusulan, masih menunggu *acc* dari Men-PANRB.

Saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Disusul aja, Pak, disusul aja, disampaikan yang sudah ada. Kami juga mungkin pahami memang sebelumnya mereka memang sudah ada gambaran, yang mana bertanggung jawab ke mana dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan belum, nanti disusul saja.

Dipersilakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Izin lanjut, ya.

Jadi, Bapak/Ibu sekalian, beberapa hal transformasi kelembagaan yang kita lakukan yang keempat adalah, yang kelima maaf, pelayanan perizinan kepada P3MI. Nah, pelayanan perizinan ini juga ada rambu-rambu dari Men-PANRB. Kita diberi waktu tenggang transisi itu sampai Desember. Jadi, jangan sampai pelayanan ini berhenti, sehingga fungsi-fungsi perizinan masih berjalan. Yang bisa kita tangani di kementerian sudah kita pelan-pelan kita ambil alih.

Kemudian, yang keenam adalah Atnaker luar negeri dan staf teknis. Ini agak ramai juga di antara Naker dengan kementerian baru ini. Kami pelajari ternyata dari 10 fungsi Atnaker, 9 itu fungsi ada di kementerian kami, 1 fungsi di Naker. Jadi, tapi itu tergantung nanti di Kementerian PANRB.

Bapak/Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke transformasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi, ada beberapa langkah yang kita siapkan agar perlindungan ini betul-betul efektif dan meminimalisir terjadinya apa yang disebut eksploitasi terhadap pekerja migran.

Yang pertama adalah optimalisasi pelayanan jaminan sosial PMI yang meliputi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Saya kira, Bapak/Ibu lebih paham soal BPJS Kesehatan, sampai hari ini belum bisa kita maksimumkan.

Yang kedua adalah optimalisasi fungsi *lounge* PMI yang ada di bandara. Beberapa bandara-bandara basis buruh migran itu kita aktifkan, kita optimalkan agar fungsinya tidak hanya sekedar transit, tetapi juga banyak fungsi-fungsi lain yang bisa memudahkan, mengefisienkan calon pekerja migran itu ketika dia akan berangkat dan ketika dia akan pulang, tidak terlalu banyak permainan yang bisa merugikan mereka. Jadi, ini kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Kementerian BUMN dan Kementerian Dalam Negeri untuk *launching lounge* ini sebagai bagian dari program 100 hari kita, optimalisasi ini.

Yang ketiga adalah pengembangan sistem melalui integrasi SISKOP2MI dengan sistem IT jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kita, bayangan kita ingin seluruh data terintegrasi di sini, baik itu data tentang portal WNI, maupun yang dari imigrasi, (ucapan kurang jelas 00:40:36), kemudian yang dari Dukcapil, kemudian juga dari SISKOP2MI, dan termasuk BPJS. Kita ingin ini nanti kita *upgrade* dan kita satukan dalam satu SSKO ini, sehingga komunikasi, informasi, dan efektivitas bisa terjadi.

Kemudian, optimalisasi sistem layanan perlindungan PMI di luar negeri oleh Atnaker dan perwakilan. Jadi, mimpi kami, Ibu Ketua dan Bapak/Ibu sekalian, Atnaker ini kita pengin tidak hanya hanya berfungsi sekedar administrasi, tetapi kita ingin sebenarnya Atnaker ini fungsi *intelligent economy*-nya, fungsi kerja samanya, fungsi promosinya, fungsi diplomatiknya berfungsi. Ini kalau ini bisa terjadi, kita bisa ikut Filipina, seperti di Filipina. Kalau di Filipina itu Atnaker bisa kerja sama langsung dengan negara atau perusahaan. Itu akan lebih baik. Kontrolnya juga akan lebih baik. Kalau sekarang ini kan, kalau sekarang ini rata-

rata Atnaker kita ini ya fungsinya ya so-so aja, begitu-begitu aja. Jadi, mungkin butuh dukungan dari Bapak/Ibu sekalian karena ini kalau harus mengubah ini harus ada dukungan politik dari DPR.

Yang keempat, yang kelima, mendorong kenaikan pendapatan PMI secara berkala. Maksudnya begini, banyak pekerja migran kita itu sudah bekerja cukup lama, gajinya tidak naik-naik. Banyak yang diperpanjang, tidak naik-naik. Misalnya G2G Korea, gajinya misalnya standar saya taruhlah 500 gitu, ya. Setelah 3 tahun dia diperpanjang lagi, itu ternyata belum naik-naik. Nah, kita ingin mendorong agar seluruh kerja sama-kerja sama itu memperhatikan itu, setiap tahun pastikan naik, harus kita naikkan, bagaimana caranya. Ini memang PR besar untuk kita semua ke depan.

Selanjutnya adalah, yang keenam, pembentukan tim reaksi cepat penanganan permasalahan PMI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi, Bapak/Ibu sekalian, sekarang ini sebenarnya ada banyak kasus-kasus besar yang terjadi, yang penanganannya itu belum maksimum. Kita pernah dengar, misalnya, ada 50 orang di Myanmar yang korban perdagangan orang, itu sampai hari ini kita tidak bisa menyelesaikan. Ini akan menjadi fokus kita. Jadi, kita pastikan bahwa kehadiran negara soal perlindungan pekerja migran ini harus optimal, harus cepat. Jadi, ketika ada kasus, ada tim yang hari itu juga bisa menangani. Soal selesainya, soal nanti, yang penting tertangani dulu publik, publik bisa merasa bahwa negara hadir.

Kemudian, yang ketujuh, klasifikasi P3MI berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan. PMI kita ini, perusahaan kita ini, itu harus kita punya gradasi, punya kualifikasi, ada PMI yang baik, ada PMI yang sedang dalam teguran-teguran, ada PMI nakal. Nah ini yang nakal-nakal, P3MI ini, yang nakal-nakal ini akan kita gunting, akan kita potong sedemikian rupa, sehingga, karena kalau masalah utama salah satunya adalah di, di *recruiting* ini, di perusahaan ini. Makanya, kita sedang mencoba menyusun cara dan konsep untuk melakukan *rating* atau ya *pe-rating-an* daripada perusahaan penempatan migran Indonesia.

Yang kedelapan adalah optimalisasi perlindungan ABK. Nah, ABK ini masih problem, Kak Irma, karena kan yang masih masuk dalam PMI itu baru niaga dan perikanan. Sementara hubla, perhubungan, itu meminta bahwa seluruh ABK yang ikut kapal pesiar dan sebagainya ini tidak termasuk PMI. Padahal menurut undang-undang dan PP bahwa yang disebut PMI itu adalah orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia. Nanti kami mohon dibantu soal ini, supaya prinsipnya kan kementerian ini adalah seluruh yang bekerja di luar negeri itu harus terlindungi, harus hadir negaranya. Nah, ini prinsip kita, sebenarnya hadirnya di situ. Kemudian, jadi, soal ABK ini masih sama Kementerian Perhubungan masih harus kita negosiasikan.

Yang kesembilan adalah optimalisasi pemberdayaan ekonomi dan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kita sudah bicara dengan Kementerian Sosial,

Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM untuk melakukan kerja sama dalam konteks rehabilitasi setelah mereka pulang ke Indonesia. Tinggal nanti MoU-nya lagi kita susun bersama, tapi sebenarnya kita juga punya mimpi begini, Ketua. Bayangkan kalau kita bisa mengontrol pendapatan PMI kita yang di luar negeri itu ada untuk keluarga, ada untuk *living cost*, ada untuk modal kerja ke depan, ada untuk rumah, misalnya, wah, itu akan sangat baik. Nah, kita lagi cari sistemnya, modelnya, supaya mudah-mudahan ini bisa terjadi dan tidak melanggar hak asasi. Saya takutnya kalau itu dianggap melanggar hak asasi.

Kemudian, yang kesepuluh adalah meminimalisir penempatan nonprosedural. Ini yang, terus terang, agak berat, tapi kita punya satu pola, mudah-mudahan ini disetujui. Jadi, ada PMK tentang Peraturan Menteri Keuangan yang memberi kelonggaran fiskal untuk pengiriman barang. Nah, itu kalau diumumkan bahwa ada yang mau dapat ini harus masuk SSKO, itu ternyata dalam setahun ini mereka daftar yang nonprosedural 30 ribu, data yang masuk ke SSKO itu. Jadi, efektif ini, ya terutama yang dari Arab Saudi itu.

Bapak/Ibu sekalian, saya kira, itu yang menjadi poin yang sedang coba kita susun dalam waktu dekat. Selanjutnya, tentu kita terbuka, ada masukan dari Bapak/Ibu Anggota DPR, kita lebih senang kalau ini diperkuat, ditambah, yang penting kami bisa realistis, artinya program itu bisa kita eksekusi.

Terima kasih, Ketua. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Baik, Bapak/Ibu, untuk mendapatkan masukan yang lebih konkret, kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di meja saya sudah ada daftar yang akan bertanya.

Yang paling pertama, yaitu Ibu Ranny Fahd Arafiq, kami persilakan. Siap-siap, Pak Zainul.

F-GOLKAR (RANNY FAHD ARAFIQ):

Izin, Pimpinan. Terima kasih.

Pak Menteri, Bu Wamen, Bapak Wamen, dan para jajarannya.

Pimpinan, biasanya senior dulu, sekarang juniornya dulu, mohon maaf.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Sesuai jadwal.

F-GOLKAR (RANNY FAHD ARAFIQ):

Pak Menteri, Bu Wamen, Bapak Wamen, saya beberapa hari yang lalu coba merangkum permasalahan, yang hanya beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan. Mungkin salah satunya itu Kementerian BP2MI harus memastikan dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk perlindungan pekerja migran secara akuntabel, karena Badan Pemeriksa Keuangan baru-baru ini mengusulkan agar pengelola keuangannya itu dan program-programnya lebih transparan dan sesuai peraturan.

Contohnya tentang pengelolaan dana pelatihan bahasa Korea, kalau enggak salah, dan penempatan biaya TKI yang mencakup tiket pesawat, visa, asuransi, dan lain-lain. Itu dananya mungkin bisa nanti disusulkan tertulis saja, Pak Menteri, ke Komisi IX, karena kita juga pengen tahu, Pimpinan, agar transparan.

Lalu, kementerian mungkin bisa juga cek atau sidak ke lokasi pelatihan TKI, itu masih ada penambahan biaya-biaya, yang tadi Pak Menteri sampaikan. Itu masih ada, Pak. Jangan sampai nanti DPR yang sidak atau lagi kunjungan terima-terima masalah-masalah yang ada, karena biaya-biayanya masih banyak yang di luar ketentuan, Pimpinan. Begitu, Pak Menteri.

Yang kedua, jumlah tenaga kerja migran di luar negeri itu cukup banyak dan menghasilkan pendapatan negara yang banyak juga apabila dioptimalisasi dengan jumlah kuota yang ditentukan. Namun, jika kuotanya ditambah pun tidak ada masalah, karena mengurangi jumlah pengangguran juga dan meningkatkan devisa negara, Pak Menteri.

Lalu saya mau bertanya tentang asuransi, Pak Menteri, asuransi tenaga kerja migran kita ini yang mengelola di dalam negeri ini siapa? Apakah bisa dipakai di tempat mereka bekerja? Jika tidak bagaimana nasib tenaga kerja kita ini jika sakit atau mengalami kecelakaan di luar negeri? Atau apakah bisa pihak kementerian membuat asuransi yang bisa dipakai oleh pekerja kita di sana dan mungkin bisa dilakukan seperti Indonesia, dilakukan pemotongan gajinya agar bisa meng-cover kesehatannya atau jika mereka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan?

Mungkin itu aja, Pak Menteri, Bu Wamen, Bapak Wamen, Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Zainul.

F-PKB (ZAINUL MUNASICHIN, M.A.):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Pimpinan, Pak Menteri, Pak Wamen bersama dengan seluruh jajaran.

Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Menteri bersama Pak Wamen. Ini kementerian baru, sebagai kementerian baru, menurut saya, perlu untuk di ini, Pak, perlu untuk melihat lebih dalam lagi terkait capaian-capaian yang sudah dilakukan atau sudah dicapai oleh lembaga yang lama. Dalam artian, termasuk *stakeholder-stakeholder* yang terlibat agar tidak, satu, tidak mulai dari nol, selain itu juga agar ada kerjaan-kerjaan yang terakumulasi seperti itu.

Contoh, misalnya, mohon maaf, Pak Menteri, tadi Pak Menteri ber-*statement* bahwa Atnaker-Atnaker kita ini kerjanya so-so saja. Menurut saya, mungkin perlu dijaga, *statement-statement* seperti itu, karena apa? Karena itu seolah-olah menafikan kinerja kelembagaan yang lain. Kalau memang ada yang kurang maksimal, dikoreksi, tapi tidak perlu untuk menyampaikan dengan bahasa yang seperti itu, Pak, karena Bapak adalah menteri baru, perlu untuk memperlambat hubungan dengan kelembagaan yang lain.

Yang kedua, Pak Menteri, hal yang terberat itu adalah sebetulnya bukan di level memberangkatkan. Level terberat itu adalah perlindungan mereka pada saat mereka bekerja. Membayangkan pekerja migran yang kerja di Timur Tengah, dia tinggal di satu rumah, rumahnya jauh dari mana-mana, kemudian enggak ada akses komunikasi, seperti itu. Apa yang terjadi di dalam rumah itu, itu yang menurut saya menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Kementerian P2MI ini untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja, pekerja migran kita ini benar-benar terproteksi dengan baik pada saat mereka ada di tempat kerjanya, Pak.

Daya jangkau, supervisi dari kementerian ini untuk bisa masuk ke tempat atau titik pekerja migran kita bekerja itu betul-betul harus benar-benar bisa dipastikan. Kalau memang secara fisik tidak bisa dipantau dengan baik, minimal ada sistem teknologi yang bisa memantau itu, Pak. Akan sangat membantu, gitu.

Jadi, pekerja kita ini kondisinya, kondisi hariannya, kondisi minggunya itu bisa ter-*report* dengan baik oleh kementerian ini. Jadi, tidak ada pekerja migran yang lepas pantauan dari kita. Jangan sampai ada pekerja migran yang terisolasi, yang dia ketutup aksesnya. Itu yang seringkali menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja migran karena akses yang sangat tertutup, itu.

Kemudian, yang ketiga, saya sangat apresiasi ketika poin 9 ini, Pak Menteri ini, optimalisasi pemberdayaan ekonomi sosial dan rehabilitasi dan integrasi sosial pekerjaan migran. Ini betul-betul menjadi tantangan yang luar biasa, Pak Menteri. Di samping saya ada Pak Heru, dari Tulungagung. Salah satu, ada salah satu kampung di Tulungagung itu kampung TKI. Itu kecamatan, kebetulan Kecamatan Rejotangan. Itu hampir di setiap rumah itu pasti ada yang berangkat jadi TKI dan gantian. PMI, *sorry*, yang menjadi PMI. Ya, kalau enggak, tahun ini suaminya. Nanti 2 tahun, suaminya pulang, ganti istrinya. Istrinya pulang, habis itu ganti anaknya. Itu terus gitu, Pak, seperti itu, tapi banyak sekali kejadian, mohon maaf ini, kondisi rumah tangga pekerjaan migran kita ini yang sukses juga banyak, Pak. *Success story*-nya juga banyak, tapi cerita sedih tentang kondisi rumah tangganya itu juga jauh lebih banyak, Pak. Mohon maaf, yang soal perceraian, anaknya tidak terurus, segala macam itu. Artinya, mudaratnya itu, pulang tahu-tahu bawa anak, sementara statusnya masih bersuami. Itu banyak sekali, Pak, iya.

Menurut saya, rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini, ini kalau Pak Menteri bisa melaksanakan, top banget, Pak, benaran. Bagaimana pekerja migran kita ini tetap bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan ekonominya, tapi keluarganya juga utuh, terjaga harmonis, anak-anaknya juga terurus, gitu.

Saya kira, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Zainul.

Masih banyak yang ingin disampaikan tapi terbatas waktu. Selanjutnya kami persilakan Pak Ashabul, siap-siap untuk Pak Muazzim.

Kami persilakan.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Menteri, Pak Wamen, dan jajaran,
Teman-Teman dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia yang saya hormati.**

Ini menjadi menarik, kenapa? Karena persoalan migran ini, ya mohon maaf ini, Pak Menteri, ini sudah sekian tahun, sudah tiga lembaga, seperti yang saya katakan, mengalami perubahan dan permasalahannya itu-itu terus. Visi Presiden Pak Prabowo menyampaikan bahwa salah satu poin penting yang harus menjadi fokus kementerian ini adalah perlindungan migran kita yang ada di luar.

Kadang kita bertanya, kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang mau kerja di luar negeri. Banyak, Pak, termasuk di kampungnya Pak Wamen ini, Pak Zulfikar itu, paling banyak, Pak. Itu kalau Pak Zulfikar nanti kunjungan kerja ke sana, tolong ke Goa, Pak, utamanya di daerah pegunungan sana. Saya pernah ke sana Pak, sosialisasi BP2MI, dan umumnya ilegal, Pak, umumnya ilegal, tetapi semangat untuk menjadi tenaga kerjanya migran itu tidak surut hanya karena problem ilegalnya itu. Saya tanya siswa waktu saya sosialisasi, "Kamu kok bisa punya HP?" HP-nya itu udah canggih banget. Saya tanya, "Kamu anaknya siapa?" "Bapak saya, Pak, kerja di Malaysia." Nah, ini yang tetangganya lihat juga, "Itu anaknya anu pake HP. Ayo dong, Pak, mau pergi juga."

Nah, jadi, saya kira begini, Pak, enggak apa-apalah mereka pergi ke luar, tapi mungkin yang perlu kita tekankan, mereka berangkat itu, di samping memang memiliki keahlian, yang paling penting mereka berangkat secara legal sesuai dengan prosedur.

Nah, di sini saya lihat peranan kepala daerah, khususnya pemerintah desa itu, Pak, ini sangat penting. Pemerintah desa itu adalah tokoh yang didengar oleh masyarakat, untuk tidak membiarkan mereka berangkat dengan cara yang ilegal. Seperti yang biasa diberangkatkan oleh Pak Muazzim ini, P3, Pengiriman Tenaga Kerja di NTB. Dia ngomong tadi, saya ngeluh dia, "Itu gimana, Ketua, moratorium di Timur Tengah belum dicabut-cabut." Saya bilang, saya termasuk yang setuju untuk tidak dicabut dulu moratorium itu, kenapa? Karena kita sudah berkali-kali membuat perjanjian bilateral, tetapi di sana itu selalu mengingkari perjanjian itu, Pak. Nah, mudah-mudahan, ke depan ini bisa dicabut. Kalau pekerja kita tidak terlindungi, untuk apa mereka dikirim ke sana? Untuk apa?

Nah, yang kedua, saya lihat juga yang memotivasi mereka mau kerja ke luar negeri itu, Pak, mahasiswa, karena persoalan pendidikan. Jadi, mahasiswa ini anak-anak muda mengejar beasiswa, setelah mendapatkan beasiswa, mereka belajar di luar negeri, dan dari situ mereka memanfaatkan untuk mencari kerja dan lumayan, Pak, pendapatannya itu mahasiswa yang ada sana.

Nah, kemudian yang ketiga, ya ini juga ini problem utamanya ini, Pak, keterbatasan lowongan kerja dalam negeri. Iya. Orang enggak mau, Pak, pergi kalau memang ada peluang kerja dalam negeri, Pak, enggak mau. Kalau gajinya

beda sedikit saja enggak mau, tapi ini kan problemnya di sini. Angka pengangguran kita kan cukup tinggi, Pak. Nah, ini yang mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian, dukungan keluarga. Jadi, kenapa mereka mau berangkat ke luar itu bekerja, karena dukungan keluarga, dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang dimiliki layak, setelah dia melihat tetangganya yang berangkat begitu ke sana.

Nah, tapi yang terpenting, yang saya ingin sarankan ke Pak Menteri ini, yang pertama, perlu perjanjian bilateral dengan negara-negara pengguna PMI ini. Saya kira ada beberapa negara yang sudah melakukan perjanjian seperti ini, tapi apakah semua negara tujuan pekerja ini, pengguna PMI, sudah kita lakukan atau belum?

Kemudian, yang kedua, perlu ada pos, pos atau posko perlindungan, Pak. Jadi ketika muncul masalah di negeri itu, di negara itu, mereka bisa mengadu, mengadukan permasalahannya untuk mendapatkan bantuan. Kalau perlu, ada semacam komunitas pekerja migran. Jadi, bukan hanya dalam negeri ada komunitasnya, tapi di luar negeri juga diperlukan komunitas.

Nah, kemudian yang keempat, ini juga perlindungan dalam negeri. Apa bentuk perlindungan dalam negeri? Yakni pemberdayaan ekonomi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waktu habis, ya.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Kemudian dukungan psikologis bagi keluarga migran. Ini penting, dukungan psikologis bagi keluarga migran yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang bekerja di luar negeri. Ini menjadi penting.

Saya kira itu, saya dibatasi oleh waktu. Itu aja, Pak, untuk sementara.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan Pak Muazzim. Setelah Pak Muazzim, siap-siap untuk Pak Alifudin. Kami persilakan.

F-PAN (H. M. MUZZIM AKBAR, S.I.P.):

Saya, Bu, ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Bu Ketua dan beberapa Pimpinan yang saya hormati.

Iya, Pak Menteri dengan Ibu Wamen, *alhamdulillah*, selamat. Hari ini saya lihat tidak pakai lagi baju Sikat Sindikat, ya. Jadi, kemarin kalau saya lihat pegawai BP2MI itu kayak Bareskrim aja. Ya, bajunya di belakang itu "Sikat Sindikat" kayaknya semua sindikat, disikat sindikat, wah, luar biasa. Hari ini begitu saya masuk tadi, saya lihat bajunya enggak ada yang tulisannya "Sikat Sindikat" ini luar biasa ini, *alhamdulillah*. Terima kasih.

Yang pertama, tentu, ya saya ini jujur, saya pelaku dari tahun 77. Jadi, penempatan pekerja migran Indonesia ini, tahun 77 itu enggak ada aturan, masih zaman PT Binawan, maka kita PJ TKI dulu itu minta kepada pemerintah supaya dibikin aturan melalui keputusan menteri apa pun namanya, dulu, pada saat itu. Jadi, kalau bicara tentang PMI, saya hafal dari A sampai Z, urusan PMI. Sampai dengan hari ini, *alhamdulillah*, dulu ini namanya Balai Akan, Balai Antarkerja Antarnegara, sampai sekarang *alhamdulillah* menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tentu, ada beberapa hal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, fokusnya ada dua, yaitu satu, pelindungan, yang kedua, tingkatkan devisa untuk negara kita. Kaitan dengan pelindungan, kalau bisa, saya mengusulkan, ini pelindungan jamsostek yang diberikan kepada PMI hari ini dibandingkan dengan pada saat konsorsium asuransi yang lain, itu lebih bagus dibandingkan dengan jamsostek hari ini, karena pelindungan prapenempatan, kalau ada TKI gagal berangkat itu dapat, dapat dari asuransi. Nah, tetapi sekarang kalau jamsostek enggak dapat. Jadi, kalau gagal berangkat karena sesuatu dan lain hal, apakah itu kesalahan dari P3MI atau dari PMI-nya, itu dapat dia dari asuransi. Nah, sekarang tidak ada. Nah, ada praasuransi, ada masa penempatan, dan purnaasuransi, ada tiga, ya, asuransi.

Yang kedua, dengan adanya kementerian sekarang ini, kita berharap untuk kembalikan lagi layanan terpadu satu pintu di masing-masing, sekarang kan Kementerian P2MI ini sudah punya kantor di seluruh Indonesia. Jadi, layanan terpadu satu pintu itu semuanya pelayanan PMI itu ada di sana. Bila perlu, kementerian ini punya medikal khusus di sana, jadi yang akan medikal, yang akan paspor, yang akan semua PMI ini, dari pra sampai dengan penempatan itu satu pintu. Nah, untuk dihidupkan kembali layanan terpadu satu pintu itu, dan dikelola oleh Kementerian P2MI.

Nah, kenapa banyak PMI kita yang memang ilegal? Ya, jangan salahkan mereka, karena proses terlalu panjang kalau melalui pemerintah. Ini yang harus kita potong, maka kita, bagaimana kita membikin layanan terpadu satu pintu untuk mempercepat proses itu, dengan tentu biaya yang murah, karena sekarang misalnya medikal saja sampai 800 ribu, periksa kesehatan TKI ini. Kita saja, yang jadi pegawai ini, kalau medikal enggak sampai segitu. Apa saja yang diperiksa itu?

Setelah saya tanya-tanya, ternyata itu uang medikal itu dibagi-bagi, ada untuk asosiasinya, ada untuk inilah, kesehatan lah, macam-macam. Kalau dikelola dengan baik itu, saya rasa, enggak segitu biayanya.

Begitu juga paspor PMI ini, itu kan gratis, sebenarnya. Nah, kalau dikelola benar-benar dengan kementerian yang sekarang kita miliki ini, kalau benar-benar gratis, ya sudah, kita gratiskan. Jadi, *cost* untuk penempatan pekerja ke luar negeri itu akan menjadi lebih kecil.

Yang ketiga, yaitu kaitan dengan...

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waktu, ya, Pak.

F-PAN (H. M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P.):

Iya. Atnaker yang ada di kedutaan. Sekarang ini, kan, Atnaker yang ada di sana itu kan masih karyawannya Kementerian Tenaga Kerja dan tentu kita harapkan nanti Atnaker ini, kadang-kadang kalau ada masalah di luar negeri, yang berkaitan dengan ini, karena dia tanggung jawabnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi Atnaker yang ada di kedutaan, itu kita harapkan nanti dari Kementerian P2MI, tidak lagi dari Kementerian Tenaga Kerja.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waktu habis, Pak.

F-PAN (H. M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P.):

Ini banyak sekali, tapi ya nanti kita tambah lagi, lah. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Kami persilakan, Pak Alifudin. Setelah ini Ibu Nafa.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan dan Anggota Pimpinan.

Bapak Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran.

Saya ingin menambahkan, kebetulan saya di Dapil Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Negeri Jiran, Sarawak, Malaysia yang mana soal PMI nonprosedural sangat banyak, gitu, ya. Di konstituen kami selalu bicara lebih mudah nonprosedural, ilegal, katakanlah. Kita sudah selalu mengarahkan agar prosedural, ya.

Jadi, kami harapkan adanya kemudahan-kemudahan, sehingga biayanya tidak terlalu tinggi, sehingga masyarakat, khususnya yang di perbatasan itu, lebih suka prosedural, sekarang mereka lebih suka non-prosedural ya. Padahal begitu mereka ada masalah, dideportasi, tetap yang bertanggung jawab adalah BP2MI. Dalam hal ini, sekarang kementerian yang bertanggung jawab.

Termasuk uang, mengembalikan ke daerah asalnya. Ya, istilahnya masuknya ke luar negeri tidak izin, pada saat pulang, kementerian akan mengeluarkan biaya sampai ke daerah asalnya. Inilah yang kejadian yang ada, jadi sebagai bahan informasi saja ya. Mudah-mudahan, ke depannya, hal ini dengan, apalagi dengan terpisahnya dengan Kementerian Tenaga Kerja, dibuat yang aturannya benar-benar memudahkan PMI, tidak menyusahkan, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Silakan, Bu Nafa. Setelah ini Bu Irma.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom.*

Akhirnya bertemu sama Bapak Karding di sini. Selamat, Pak Menteri, kita kemarin bertanding di Dapil VI, akhirnya ketemu, Pak. Memang kita tidak pernah ada yang tahu ya kan, Pak, saya yang jadi, eh Bapak jadi menteri.

Baik, Pak, kembali lagi tadi saya mau mengulangi apa yang Bapak Ashabul Kahfi tadi sampaikan tentang persoalan migran ini yang sudah berperiode yang tidak belum terselesaikan sampai saat ini. Saya mau mengangkat isu krusial, Pak, terkait buruh migran.

Kembali lagi, bahwa buruh migran kita itu sering mengalami kekerasan, dari kekerasan seksual, pelecehan, penganiayaan, penyiksaan, ini tuh sering banget terjadi. Terlalu sering dan sampai sekarang masih belum ada jalan keluarnya tuh seperti apa.

Lalu juga migran-migran perempuan yang dianiaya oleh majikannya, atau tiba-tiba migran ini pulang ke kampungnya dengan hamil lagi, entah anak dari siapa. Nah, kalau saya ini, Pak ya, saya *basic* saya itu pelayanan, Pak, di gereja. Jadi, biasanya kami kalau di gereja itu kita punya rumah singgah, di mana kita itu pas menangani orang-orang tersebut atau korban-korban tersebut itu langsung *one on one*. Makanya memang kalau hal-hal demikian terjadi itu enggak bisa, Pak, kalau Cuma, oke kita wacana seperti a, b, c, gitu, tapi kalau tidak ditanganin *one on one*, sama aja.

Makanya saya sangat setuju, tadi Pak Kahfi bilang harus ada pusat rehabilitasinya, tapi harus ada juga orang-orang yang mau dan rela hati untuk melayani orang-orang ini, untuk menyembuhkan mentalnya kembali. Itu salah satunya, karena bagaimanapun juga, banyak korban-korban ini yang tidak mengetahui hukum, apalagi bahasa, adat, istiadat, negara setempat, mereka enggak paham, Pak.

Jadi, saya harap, ini bukan hanya wacana, bahwa tadi Bapak Karding bilang bahwa negara harus benar-benar hadir untuk mereka. Itu yang artinya bahwa kita punya tanggung jawab bukan sebagai untuk manusia aja. Kita tidak mengerjakan buat manusia aja, tapi kita sedang mengerjakannya buat Tuhan. Jadi kalau benar-benar negara bisa hadir untuk para korban ini, saya harap semuanya bukan wacana, tapi benar-benar bisa direalisasikan.

Saya rasa itu, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Bu Irma. Setelah itu Ibu Netty.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,
Kawan-kawan IX Komisi IX yang saya cintai dan banggakan,**

Kementerian PMI ya sekarang, ya? Kementerian P2MI.

Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Kebetulan Pak Menterinya ini sahabat saya sebenarnya, sahabat dekat banget nih malah ya, *soulmate* kita, nih.

Pak Menteri yang saya hormati,

Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa program prioritas yang menurut saya itu bisa menjadi *tools* untuk Bapak dan kawan-kawan dan jajaran bekerja dengan maksimal. Yang pertama, saya kira, Bapak mesti memastikan dulu anggarannya nanti. Anggarannya BP2MI kemarin itu kecil sekali. Jadi, enggak mungkin bisa melayani, melindungi seluruh PMI kita di Indonesia. Menyedihkan dan sekarang karena sudah menjadi kementerian, saya kira, enggak boleh lagi menyedihkan seperti ini.

Kami di Komisi IX, terus terang, pasti akan dukung, *support* banget, karena memang ini penting banget, ya, penting sekali untuk bisa melindungi tenaga kerja luar negeri kita. Dari sini, kita bisa meningkatkan devisa negara, lo. Kita bisa lihat itu yang namanya Filipin, ya. Nah, pendidikan vokasinya, kan luar biasa sekali itu, kalau itu memang bisa dicapai, gitu. Saya kira, ini kita bisa mengurangi pengangguran, kemudian memperluas lapangan pekerjaan, ya. Ini gede banget ini, Pak Menteri, amal jariahnya nanti.

Kemudian, ketersediaan SDM-nya, nih. Tadi ada Atnaker di luar, kemudian teman-teman di P3MI-nya yang di daerah. Ini juga mesti menjadi kontrol, karena terus terang saja, kalau teknisnya, kalau kayak ABK itu teknis menurut saya, nanti Pak Menteri bisa bicara sama Menhub, tuh, karena dari dulu tuh menjadi masalah terus yang enggak selesai-selesai. Saling klaim, tapi saling klaim kalau ada yang bagus, kalau ada yang jelek tuh saling lepas tangan, tuh. Nah ini yang selama ini terjadi dan itu harus benar-benar diajak ngomong, supaya itu bisa jelas nanti pertanggungjawabannya kepada siapa.

Juga mengenai administrasi, tadi disampaikan kepada oleh Beliau dari NTB ya kan, bahwa itu harus dipermudah. Saya setuju dipermudah, tapi jangan juga begitu dipermudah, semua bisa lolos, yang enggak benar juga lolos juga nanti, enggak bisa begitu juga.

Nah, Pak, saya juga ingin menyampaikan itu Konsorsium Asuransi itu Komisi IX, Pak, yang bubarin, Pak, karena menurut kami itu jahiliyah, ya? Itu yang Bapak sampaikan itu parsial aja, itu kasus, Pak, tapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, maka kemudian dibubarkan oleh Komisi IX waktu itu.

Ya, jadi banyak sekali klaim yang tidak terealisasi, *only* 10—20%, Pak, yang bisa direalisasikan oleh konsorsium itu. Bapak bisa bayangin, tuh, berapa puluh triliun itu. Nah, itu kenapa kemudian kami bubarkan, ya, supaya jelas dulu ini.

Kemudian, koordinasi antarkementerian, Pak Menteri. Ini koordinasi antarkementerian ini penting sekali, dengan Kemenaker, kemudian dengan Menlu, kemudian dengan pihak yang berwajib, kenapa? Karena *unprocedural* itu lolosnya biasanya justru di-*backup* oleh angkatan-angkatan itu, oleh pihak-pihak yang berwajib itu. Misalnya di lubang-lubang tikus pemberangkatan di kapal, kemudian di bandara, itu semuanya justru ada *backup-backup* oknum-oknum yang nakal-nakal itu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian Bapak untuk bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut secara efektif, konstruktif.

Nah, kemudian pihak imigrasi juga penting untuk diajak bicara, karena banyak juga teman-teman di sana juga nakal-nakal tuh, dilolosin semua, tuh, yang *unprocedural* tuh ya, ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian Bapak. Nah, kemudian, tadi koordinasi antarkementerian sudah, ya. Empat program aksi. Nah, regulasi nih ya, regulasi, regulasi terkait dengan bagaimana penempatan dan perlindungan itu betul-betul bisa melindungi dan bermanfaat bagi PMI kita.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Habis waktu, Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Yang kedua. Iya, Bu, sebentar, Bu. Negara dan penempatan, negara penempatan. Yang ketiga perlindungan, yang keempat optimalisasi pemberdayaan purna-PMI.

Saya kira, yang saya sampaikan ini penting sekali, supaya nanti Bapak gampang sekali, ya, kita untuk bisa mengontrol dari semua program-program aksi Bapak.

Saya kira, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan,

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Kami persilakan untuk Ibu Netty. Setelah Ibu Netty, Bapak Dr. Sihar Sitorus. Kami persilakan.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Ibu Ketua, Ibu Netty tadi menitipkan ke saya. Jadi, boleh digantikan ke saya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh iya, silakan, Ibu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Baik. Ibu Netty izin karena sudah harus berangkat ke Bandung. Baik.

**Pak Menteri, Bapak/Ibu Wamen, dan semua jajaran,
Pimpinan Komisi IX dan seluruh Anggota Komisi IX.**

Jadi, Pak Menteri, ini Pak Menteri rasa Anggota DPR RI. Pak, jangan ngajakin berantem sama kita, Pak. Kita mau baik-baik, kok, Pak. Tadi kita nanya struktur, Pak, itu penting. Justru visi-misi presiden itu kan kita pengen tahu turunannya di struktur itu seperti apa, kenapa? Karena kita baru selesai rapat dengan Kemnaker. Kita ingin tahu irisannya ada di mana dan penyetoran anggaran itu kemarin kan terakhir di sini, Pak. Anggaran BP2MI, anggaran Kemnaker, nanti irisannya seperti apa. Jadi, ini justru organisasi ini adalah *tools* awal untuk merealisasikan visi-misi dari Pak Presiden.

Tadi Pak Menteri mengembalikan, hadir karena memenuhi undangan, di undangannya visi-misi. Nah, justru kami juga belum melihat dari agenda Presiden 2025-2029 kan ada Asta Cita, 8 misi. Ini kementerian ini tuh ngambil di mana nih dari Asta Cita itu? Karena kita kan rapat, tadi saya sampaikan, ya, Pak Menteri, kita rapat ini sudah yang kesekian kalinya nih dari hari senin, dan di mitra kami yang badan berubah menjadi kementerian bukan hanya BP2MI, tapi BKKBN juga berubah menjadi kementerian.

Jadi, kami juga sudah pengalaman, Pak Menteri, rapat dengan badan yang berubah menjadi menteri, mohon maaf, mohon izin, gitu. Makanya kami tadi bertanya, karena kemarin kita juga sudah diskusi panjang bagaimana transisi BKKBN menjadi kementerian, karena ini dampaknya panjang, gitu, dan ini kita mau *support* justru, gitu. Ya, Pak Menteri, ya, jangan salah paham.

Jadi, kalau kita bertanya itu justru kita mau *support*, gitu. Ini nanti titik tengahnya di mana, titik temunya gimana, irisannya seperti apa, transisinya bagaimana, dan transformasinya seperti apa. Kita akan *support* itu, karena apalagi pekerjaan migran ini khususnya buat saya pribadi, Mbak Christin juga tahu, karena

ini sama-sama berjuang di Dapil DKI Jakarta II, ini kita di konstituen kita. Jadi, saya sangat *concern* terhadap pekerjaan PMI ini.

Jadi, saya mengusulkan, mungkin nanti bisa disusulkan, Pak Menteri, itu turunan dari agenda presiden, terus ada Asta Citanya, kemudian nanti transformasi BP2MI ke kementerianya. Itu kan berarti akan ada transformasi di tiga aspek, tuh. Ada kebijakan, kelembagaan, dan juga program.

Nah, di kebijakan itu kita sudah punya Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, yang kemarin PP-nya itu yang ngerjain Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menteri. Nah, ini nanti sekarang nanti mau gimana? Kan gitu, karena sebenarnya undang-undang ini sudah cukup komprehensif, semua sudah diatur di situ. Cuma PP-nya belum selesai semua kemarin, setahu saya, masih baru beberapa PP, ya. Jadi, nah, ini kan berarti PR yang akan dikerjakan oleh kementerian ini atau akan diselesaikan oleh Kemnaker, nih. Saya juga belum tahu nanti irisannya seperti apa, tapi ini menjadi langkah awal untuk transformasi, karena undang-undang ini sangat bagus banget, sudah komprehensif, tinggal diturunkan dalam implementasinya.

Nanti, dari situ, kita juga akan bicara anggaran dan program, ya. Anggaran dan program tentu saja ini akan disinergikan lagi dan diseleraskan lagi, supaya mana ya tadi, kayak misalnya, ada satu direktorat ya tadi menurut Pak Menteri, yang akan dipindahkan ke kementerian ini kan, dari Kemnaker. Nah, itu kan apakah semuanya akan bedol desa, gitu, anggaran-anggaran dan programnya atau di sini akan dimodif lagi. Itu kan juga butuh diskusi panjang dengan kita. Jadi, itu kaitannya, Pak, kenapa kita tadi menanyakan struktur organisasi, karena memang *basically*-nya ada di situ. Kemarin juga kita diskusi banyak BKKBN itu, ini mau gimana ketika berubah menjadi kementerian.

Yang berikutnya adalah hal lain yang mungkin perlu dimasukkan di dalam proses transformasi nanti adalah pasar kerja dunia, ya. Sistem informasi pasar kerja dunia itu harus ada yang bisa lebih bagus lagi ke depan, apalagi karena sudah punya kementerian. Saya senang sekali, nih, pekerja migran di Indonesia diurusin secara khusus dalam bentuk kementerian sehingga *powerful*, gitu, ya. Regulasinya di sini, anggarannya di sini, enggak cuma operator.

Kalau kemarin kan BP2MI kayaknya susah banget ya, Bapak/Ibu, yang sudah berjuang dari awal ini. Anggarannya cuma kecil, mau ngapa-ngapain juga enggak punya hak untuk bikin regulasi, gitu, ya. Jadi kami *support* totalitas untuk perubahan dari badan menjadi kementerian ini dan kami sangat *concern*, Pak Menteri, bagaimana ini bisa benar-benar membenahi tata kelola ketenagakerjaan yang khusus pekerja migran Indonesia, ya, khususnya di luar negeri. Makanya, sistem informasi pasar kerja dunia itu sangat penting, ya. Beberapa PR kemarin itu kita kan ada yang G2G, ada yang P2P, ada yang G2P dan sebagainya. Itu menjadi PR yang harus kita perbaiki secara sistem.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Tiga menit.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Yang terakhir, Pak Menteri, mungkin ini juga nanti bisa disusul, itu adalah rencana 100 hari pertama ini. Apa yang akan dilakukan, sehingga kita bisa *support* di mana untuk Komisi IX ini, karena itu pasti akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman pekerja migran Indonesia, gebrakan 100 hari pertamanya Pak Presiden, meningkatkan kesejahteraan teman-teman, meningkatkan perlindungan teman-teman itu seperti apa.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita *insyaallah* selalu siap untuk bisa *support* dan apa yang sudah dilakukan oleh BP2MI kemarin rasanya jangan diabaikan, termasuk juga Bapak/Ibu Deputi, Pak Sestama, dan semua yang sudah di sini yang sudah berjibaku bertahun-tahun tahun ini mudah-mudahan juga masih bisa terus berkolaborasi gitu, ya, karena pengabdian mereka sangat luar biasa.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Sihar Sitorus. Siap-siap, Pak Nurhadi.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, B.S., B.A., M.B.A.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri, Ibu/Bapak Wamen, beserta jajaran.

Saya biasa melihat ini dari suatu yang makro, karena saya di Komisi XI, ternyata setelah mendengarkan cerita dari kawan-kawan ini semuanya sangat mikro dan ternyata kompleks, gitu, ya. Jadi, dalam hal ini, dalam pemaparan perdana ini, mungkin saya pengen minta sebenarnya adalah satu bagan alur pikir, Pak. Tadi kan, tadi dari badan kemudian menjadi kementerian, tentunya ada suatu transisi dan mungkin juga akan terjadi perbedaan prioritas dari pemerintahan yang lalu dan pemerintahan baru, dan akhirnya kita bisa melihat, nih, Pak, yang akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan ini apa.

Kemudian, saya berpikir juga, kenapa sih orang mau menjadi *migrant workers*, pekerja migran, dan tentunya saya melihat ini ada korelasi antara mudah atau sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, ya, kan. Jadi, sebenarnya, Pak, ke depannya ini P2MI ini harusnya berkurang, nih, yang migran, jangka panjangnya. Karena kalau dalam negeri kita bisa mendapatkan suatu pekerjaan, kita enggak mau mikir jauh-jauh nyari kerjaan, apalagi kalau pendapatannya berimbang. Jadi, kita akan melihat ada satu korelasi yang negatif nih, Pak, antara *migrant workers* yang saat ini, kita mungkin akan tinggi, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, tapi besok itu entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 15 tahun kemudian ini harusnya akan berkurang.

Nah, kenapa ini berkurang? Kalau saya melihat tadi mendengarkan juga dari kawan-kawan, maka ini sepertinya ada dari hulu ke hilir, Bapak pegang, nih, dari hulu ke hilir, mulai dari orang ingin mencari pekerjaan, persiapannya seperti apa. Apakah kita memiliki data atau *data center* yang mengatakan, misalnya, oh di Tokyo butuh tenaga untuk, karena di sana usianya usia tua, mungkin dia perlu *head caregiver*. Mungkin Tokyo akan butuh *caregiver*, di Saudi mungkin tempat lain, di Skandinavia juga lain.

Jadi, sektor yang mau kita dorong dengan negara tujuan ini, ini perlu ada satu *data center* supaya mengurangi *mismatching*, Pak. Kalau enggak, ada *mismatch*. Kita mempersiapkan tukang las, tapi di sana butuhnya perawat, kan ini enggak *match*, ya.

Nah, ketika kita ada *data center* ini, maka kita bisa publikasikan yang disampaikan Bapak tadi di seberang, saya mohon maaf baru sekali ini ketemu jadi belum hafal. Jadi, bisa melihat informasinya, saya mau cari kerja, mau ke Saudi, saya punya skill sebagai perawat, saya mendingan ke Saudi atau saya ke Tokyo, kira-kira gitu. Jadi, saya punya pengetahuan itu juga. Itu dari di hulunya. Di hilirnya tadi untuk misalnya untuk *placement*, untuk *placement* ini juga tadi Ibu Irma sudah menyampaikan juga perlu adanya suatu koordinasi antara departemen, antara kementerian, ya kan, karena ini ya kita bisa *pull* satu data dan akhirnya mungkin ke *protection*.

Nah, kalau kita melihat lagi semua gambaran ini, maka saya ingin melihat sebenarnya juga tadi ada suatu visi-misi dari Pak Presiden, yang kemudian Bapak akan terjemahkan menjadi strategis, langkah strategis yang kemudian ada objektifnya, target prioritasnya, program aksi, dan kemudian *outcome-output*, sampai kepada anggarannya. Karena kalau saya mendengar tadi anggarannya sangat kecil, memang ini mungkin kita harus memperjuangkan anggaran yang lebih besar kalau melihat kompleksitas daripada kementerian Bapak, nih.

Ya, jadi, itu yang mungkin kita butuhkan saat ini, apalagi Bapak Presiden meminta adanya peningkatan suatu devisa. Jadi, kalau devisa juga kita perlu tahu juga target *income* yang kita mau kejar ini seperti apa, Pak. Kalau di sini di dalam negeri dia 4 juta, di luar negeri dapat 15 juta, itu suatu gap yang sangat-sangat

besar, tapi kita untuk persiapan orang dapat 15 juta, kalau kita masukkan ke *purchasing power parity* kita di sini 10 juta, kita latih, mungkin dia enggak akan jadi pergi ke luar negeri. Di sini aja 10 juta, ya, oke sama juga, sama 15 juta, tapi saya udah diberikan bekal-bekal *skills* yang dibutuhkan. Jadi, orang lokal juga, apa *domestic company* juga, mau mempekerjakan mereka, karena kita tahu, yakin bahwa dia ada, ada *skill* yang akan, yang bagus, gitu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waktu habis, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. SIHAR P.H. SITORUS, B.S., B.A., M.B.A.):

Kira-kira mungkin, ya, terima kasih, Ibu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, ada 3 poin adalah alur pikir dari visi sampai ke anggaran, kemudian dari pendekatan hulu ke hilir, mulai dari persiapan sampai kepada *placement* dan *protection*, dan yang ketiga target *income* yang diinginkan itu seperti apa.

Demikian dari saya, Bu. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Pak Nurhadi. Setelah Pak Nurhadi, Pak Ahmad Safei.

Kami persilakan, Pak Nurhadi.

F-P. NASDEM (NURHADI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi IX.
Yang saya hormati, Pak Menteri.**

Selamat, Pak Menteri, Pak Karding, juga Ibu Menteri, Bu Kristiani Aryani, dan juga Bu Wakil Menteri ya dan Pak Wakil Menteri, Pak Zulfikar.

Pertama, saya menyoroti kaitannya dengan perlindungan sosial saudara-saudara kita yang sangat berjasa bagi bangsa ini, karena mempertaruhkan nyawa di luar negeri. Kementerian Ketenagakerjaan pada 22 Februari 2023 merilis, menyampaikan menambah manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia

untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan dari risiko terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan kaitannya jaminan hari tua.

Pertanyaan saya, sejak aturan itu diberlakukan, sudah berapa persen PMI yang bisa ter-cover oleh perlindungan sosial, baik itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Andaikan persentasenya masih sedikit, ini berarti Pak Menteri perlu melakukan koordinasi lebih intensif dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Yang kedua, terkait arahan Bapak Presiden, mendorong peningkatan devisa dari sektor pekerja migran Indonesia dan penempatan sebanyak-banyaknya pekerjaan pekerja migran Indonesia secara manusiawi. Peningkatan remitansi ini menjadi arahan dari Bapak Presiden. Kalau menurut Kepala BP2MI sebelumnya, di awal tahun ini, 2023 ini kita memperoleh remitansi itu sekitar Rp156,9 triliun.

Saya ingin Pak Menteri mungkin bisa menyampaikan semacam *blueprint* 5 tahun ke depan itu, target Pak Menteri itu berapa yang akan dicapai, dan langkah-langkah konkret nyata apa yang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran ini lakukan, karena selama ini, selama ini ada perbedaan mencolok antara Indonesia, Filipina, maupun Thailand yang sama-sama mengeksport pekerja migran. Namun, mereka jauh lebih banyak dan lebih kualitatif, dari sisi kompetensi maupun penguasaan bahasa asing. Nah, satu itu.

Yang kedua, mafia pekerja migran, jujur, kita akui, kalau kita beberapa kali kunjungan ke luar negeri, ini di Indonesia lebih banyak dan dari tahun ke tahun masalahnya terjadi itu-itu saja. Thailand, itu memperlakukan pekerja migran ke luar negeri itu hanya hanya satu pintu itu dikerjakan oleh negara. Jadi, tidak melibatkan pihak mana pun, sehingga tidak khawatir para pekerja migran itu mau tertipu, mau kena calo, dan lain sebagainya, karena memang negara benar-benar hadir melakukan pendampingan sampai mereka bisa bekerja ke luar negeri.

Nah, usulan saya juga kaitannya dengan dan pengiriman PMI ini, untuk kementerian yang baru ini bisa memperhatikan kabupaten-kabupaten yang merupakan basis, karena di dapil saya ini salah satu kabupaten pengirim terbesar, ada Tulungagung, ada Blitar, Kediri, itu tetapi SDM dari yang kemarin BP2MI ini sangat minim sekali, adanya hanya ada di Surabaya. Ini mohon diperhatikan.

Demikian, Pak Menteri, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan Pak Ahmad Safei.

F-PDI PERJUANGAN (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.):

Baik, mohon izin, Bu Ketua. Teman-teman sekalian.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya H. Ahmad Safei, A-255 dari Dapil Sulawesi Tenggara, Pak Menteri.

**Yang saya hormati, Bu Ketua,
Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, seluruh jajaran kementerian,
Teman-teman sekalian yang hadir.**

Saya kira sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit, saya kira tadi banyak disinggung oleh Pak Ashabul Kahfi juga menyinggung, Pak Dr. Sitorus juga menyinggung terkait dengan tenaga kerja migran ini. Memang ini sebuah hal yang ironi rasanya dan saya mohon maaf, Pak, kalau saya bicara praktis sedikit karena saya memang dari birokrasi, ya.

Memang sangat ironi di negara yang besar seperti Republik Indonesia, yang kaya raya, negara besar, tapi kemudian tenaga imigrannya luar biasa. Kami di Sulawesi Tenggara, Pak, kalau pulang atau berangkat setiap hari itu hampir-hampir tidak bisa dapat tiket, kenapa? Dipenuhi oleh tenaga kerja asing. Di setiap kali berangkat itu 60% isinya pesawat itu tenaga kerja asing. Berangkat atau datang, sama.

Di kami, di tempat kami, Pak, kebetulan saya mantan bupati Kolaka 2 periode. Di sana ada empat PSN, Proyek Strategis Nasional. Itu di kabupaten, Pak, itu yang rata-rata investornya waktu datang itu menjanjikan kepada kami paling tidak 10 sampai dengan 50 ribu orang bekerja di situ, kalau 4 berarti kan 200 ribu, itu baru di Kolaka, Pak. Di Sulawesi Tenggara hampir 10 PSN itu, ya. Ini baru di Sulawesi Tenggara.

Sekarang persoalannya kenapa mesti orang kita ke luar negeri, justru luar negeri datang ke kita dan itu hampir semuanya asing di situ, Pak. Ini mungkin menjadi perhatian dan ironi rasanya memang bagi kita hal ini terjadi, tapi ya, ini sudah terjadi kita jalani. Kita tinggal memperbaiki dari (ucapan kurang jelas 01:40:19) harusnya memang di setiap tahun ada bukan peningkatan, tapi kita berharap ada pengurangan, ya. Jangan malah lebih setiap tahun lebih banyak ke sana, ya, tapi kita berharap lebih sedikit. Kita berdayakan dia, industri-industri yang dibangun di Indonesia ini, di situ kita harapkan bagaimana pekerja migran tidak lagi jadi pekerja migran, tapi pekerja di negerinya sendiri.

Yang kedua, tadi disampaikan pada dua hal yang menjadi fokus dari kementerian ini, yaitu perlindungan dan devisa. Ini sebenarnya hal yang kontradiktif, perlindungan dengan devisa. Untuk meningkatkan devisa tentu caranya salah satu adalah meningkatnya sebagaimana semakin banyak orang pergi bekerja imigran ya. Di satu sisi, kalau hal ini terjadi, saya hanya minta bantuan sekali ke Bapak Menteri khususnya bahwa perlindungan betul-betul dilakukan.

Karena ini, kami saya waktu jadi... Beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja sama akademik keperawatan kami yang ada di Kolaka itu dengan akademik keperawatan yang ada di Mindanao, Filipina. Kenapa kami kerja samakan begitu? Karena kami tahu persis bahwa itu, akademik keperawatan yang ada di Mindanao itu, salah satu akademik keperawatan yang paling banyak mengirim tenaga kerja imigran ke luar negeri. Itu kami kerja samakan kemarin. Ternyata, setelah kami kerja samakan, memang ada hanya dua hal yang sangat *focusing* (01:41:52). Yang pertama bahasa, yang kedua itu adab. Itu betul-betul yang dua yang ditekankan dan telah saya amati, ini apa masalahnya, kenapa ini Mindanao begitu diminati oleh negara luar untuk meminta tenaga kerja keperawatan dari Akademik Keperawatan Mindanao ini.

Ternyata hanya dua, yang pertama itu bahasa, yang kedua adab. Betul-betul orang memahami itu, ya, karena bahasa tidak bisa lagi dibodoh-bodohi seperti apa. Yang kedua memang beradab, orang tahu karena ya saya kira utamanya negeri Timur Tengah ini, ya, Timur Tengah saya kira ini adab yang paling utama sehingga apa. Oleh itu, saya berharap perlindungan yang akan dilakukan nanti oleh kementerian ini betul-betul perlindungan, jangan hanya kepada tenaga kerjanya tapi juga kepada pengusahanya, Pak. Ini yang terpenting, pengusaha ini betul-betul ditekankan, agar supaya betul-betul tenaga kerja yang kita kirim, tenaga kerja yang betul-betul siap, bukan hanya begitu mendaftar kemudian apa, tapi betul-betul siap lah, supaya memang tidak jadi masalah. Karena kita rata-rata begitu, nanti jadi masalah, baru kita ramai-ramai, baru ramai lagi.

Saya kira ini dua hal, Pak Menteri, Bu Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Bapak/Ibu, di meja saya sudah selesai untuk daftar pertanyaan. Apakah masih ada di antara Bapak/Ibu yang ingin... Kami persilakan, Pak Muazzim.

F-PAN (H. M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P.):

Setengah menit saja.

Saya ingin tambahkan untuk PMI ke Malaysia itu. Kalau bisa, ada standar biaya, *structure*, ya, yang selama ini memang tidak ada standar biaya walaupun memang penempatan ke Malaysia itu *zero cost*. Akhirnya yang terjadi P3MI ini persaingan, ya, harga sudah ada 3.000 Ringgit, ada yang minta 4.000. Nanti akhirnya dimainkan sama majikan yang ada di Malaysia. Jadi, kita minta nanti dari Kementerian P2MI itu ada *structure cost* atau standar biaya penempatan pekerjaan migran khusus untuk ladang ke mana Malaysia.

Yang kedua, coba tolong ditertibkan ini yang LPK-LPK yang ngirim ke Jepang ini. Ya, sudah kalau LPK yang ngirim PMI ke Jepang itu justru gampang sekali, tapi kalau P3MI yang mengirim tenaga kerja harus ada *job order*, harus ada *demand letter*, harus ada dan lain-lain sebagainya. Sedangkan mereka enggak punya izin, LPK itu, tapi LPK bisa mengirim sampai ribuan itu ke luar negeri.

Saya rasa itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya di meja pimpinan. Silakan, Bu Nihayatul.

F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, Bu Wamen, dan Pak Wamen, serta seluruh yang hadir.

ABK ini menjadi PR yang luar biasa. Kebetulan saya di dua periode kemarin, termasuk di timwas, timwas PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi, memang ABK ini kalau antarkementerian atau lembaga akan sangat sulit. Jadi, yang harus bergerak menko, karena itu sudah mencakup kementerian lain. ABK ini yang memang PR-nya luar biasa, padahal mereka masuknya ke Kementerian Perhubungan, tapi laporannya ke kami di Komisi IX, karena selalu urusannya dengan ketenagakerjaan dan mereka ini tidak dapat BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya.

Jadi, memang, ABK ini harus antarkementerian dan mungkin memang sudah berulang kali, sudah berulang kali kita pertemuan juga waktu di timwas PMI itu dengan BPJS Tenaga Kerja, dengan BP2MI, dan Kementerian Tenaga Kerja, sudah berulang kali, ya, Bu? Nah, ini tapi ternyata belum ada solusi yang

bisa kita ambil secara konkret. Jadi, saya usulkan, mungkin ini levelnya di level menko, karena untuk bisa menyelesaikan 2 kementerian, itu yang pertama.

Yang kedua, ini anggaran, dari Komisi IX ini anggaran yang paling kecil adalah anggaran di ini, kementerian Bapak ini, BP2MI. Sekarang kurang dari 500, kan? Mantuknya kenceng banget, Pak Sestamanya, nih, kurang dari 500. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Mimpi kita sangat tinggi selama ini, tapi mentok anggarannya itu cuman kurang dari 500 miliar. Jadi, ini teman-teman yang ada di kantor kementerian ini banyak juga yang mengurus PMI tapi belum pernah keluar negeri, Pak Menteri. Begitu dulu, keluhannya seperti itu.

Nanti, nah, ini yang perlu juga kita berkolaborasi bagaimana mendukung untuk bisa men-*support* anggaran. Kita setiap kali anggaran pasti mendorong sesuai yang diminta oleh BP2MI saat itu, minta 600, 700, kita dorong terus tapi kenyataannya memang mentok. Jadi, salah satunya adalah soal penganggaran di bagian Biro Penganggaran, Pak Menteri, Biro Penganggarannya ini yang memang harus diperkuat, karena, memang, biasanya dari Bappenas itu memberikan anggaran tentu juga melihat dari proses penganggaran dan juga *output outcome*-nya yang akan dihasilkan. Nah ini yang perlu diperkuat dari biro penganggarannya.

Yang ketiga, soal Atase Naker, Pak. Jadi, selama ini, Atase Naker ini di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, saya sepakat dengan beberapa teman tadi yang mengatakan mungkin belum wilayah Bapak untuk memberikan evaluasi kepada Atase Naker. Nanti kalau Atase Naker itu sudah masuk di wilayah BP2MI, masuk wilayah P2MI, Bapak bisa memberikan evaluasi, karena itu mencakup wilayah kerja kementerian lain yang tentunya tidak elok untuk kita kritisi di antarkementerian. Kalaupun ini, silakan langsung dari kementeriannya langsung.

Yang ketiga, Komisi IX dan juga mitranya di BP2MI itu menjadi *call center*, ya. Mungkin Pak Menteri dulunya, Bu Wamen dulu Komisi III, Komisi VII. Nah, ini kalau Komisi IX ini *call center* betul, Pak. *Call center*, karena yang kontak ke kita ini orang yang tidak dapat BPJS Kesehatan, orang yang tidak dapat ICU, dan satu lagi orang teman-teman dari buruh, dan teman-teman PMI yang kontak ke kita.

Jadi, bagaimana penguatan pada pelayanan ini juga bisa diperkuat dan juga bagaimana kita ini kalau minta bantuan bisa juga untuk dibantu untuk segera direspon dan sebagainya, karena pasti teman-teman ini dari seluruh ini, yang dari Aceh enggak ada, ya? Dari banyak teman-teman di sini, dari dapil-dapil yang kantongnya PMI, yang pasti-pasti akan banyak yang kontak. NTB, luar biasa sebagai kantong PMI, jadi, pasti di situ banyak persoalan. Jadi, mohon untuk dibantu, *call center*-nya siapa atau Pak Sestama, Pak Sekretaris, Pak Sesmen yang mungkin nanti bisa ngontak atau seperti apa.

Memang seperti dikatakan tadi, siapa tadi, itu memang BP3MI-nya yang juga perlu diperkuat, karena berulang kali akhirnya kita, ya udah lah kita dibantu saja di bandara untuk pemulangan jenazah. Nanti kita nyari sendiri ambulannya,

karena memang tidak ada anggarannya, tidak ada anggarannya, di BP3MI-nya tidak ada anggarannya sama sekali. Kita akhirnya minta tolongnya, minta tolong untuk dibantu secara kemudahan di bandara, tapi secara transportasi dan sebagainya, akhirnya tetap kita yang harus mengeluarkan biaya.

Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Waktu ini kami akan berikan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Oh iya, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Karena tempat kami TKI.

Yang Pak Menteri, pengiriman TKI dengan berkedok magang, ya, terus biaya penempatan biasanya itu harusnya tanpa biaya (ucapan kurang jelas 01:50:44).

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Pak Menteri, jadi, seperti judulnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi, bagaimana memberikan pelindungan mulai dari persiapan PMI kita, agar mereka ini tidak diperas dengan pengurusan yang namanya visa, pengurusan paspor, kemudian pemeriksaan kesehatan, dan sampai di negara penempatan. Juga masih ada juga praktik-praktik, Pak Menteri, ketika mereka pulang, masih ada yang mengambil pungutan bagi mereka. Nah, ini pelindungan untuk PMI kita, ini menantang untuk Pak Menteri kita yang baru.

Kami persilakan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang sudah disampaikan secara umum, yang lain-lain bisa secara tertulis.

Kami persilakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, secara umum.

Izin, kami ingin menjawab yang spesifik soal Ibu Ranny, menyangkut pelatihan. Kami di kementerian tidak mengelola pelatihan, tetapi yang mengelola itu adalah LPK yang melakukan pelatihan. Jadi, kita lagi berusaha untuk mencari model agar LPK ini juga bisa kita kontrol, karena mereka yang melakukan pelatihan. Biasanya mereka juga sama pemerintah daerah, itu yang bisa kami sampaikan.

Kemudian, penambahan biaya dalam rekrutan seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua juga. Jadi, memang, sebenarnya kalau ini tidak kita selesaikan sejak awal. Jadi, ini kan paling bawah di desa, di desa biasanya ada PL, PL itu Petugas Lapangan. Biasanya, PL ini, karena dia sifatnya tidak formal, PL ini, dalam tanda petik, kadang-kadang berfungsi yang orang lain sebut, mohon maaf ya, calo, makelar, ya.

Nah, di sinilah biasanya masyarakat kita ini ada dua modus, biayanya ditinggikan atau dipinjam uang, biayanya itu. Makanya, oleh karena itu, nanti kita harus punya cara memotong alur ini. Yang kedua, kita harus punya skema pembiayaan, yang kira-kira orang mau daftar itu, orang daftar itu, tidak perlu keluar biaya banyak. Termasuk lembaga terpadu satu atap, tadi sekaligus menjawab yang ada. Kita ingin lembaga terpadu satu atap ini hampir semua ditangani di sini kalau bisa, paspornya, BPJS-nya, Dukcapil-nya, seluruh lah administrasi itu kita tangani di sini. Mungkin yang enggak bisa kita tangani itu kesehatan, kesehatan butuh waktu, tapi kalau Pak Muazzim mau bikin, nanti kita coba diskusi sama Kementerian Kesehatan. Yang mungkin bisa kita lakukan, nego ke Kementerian Kesehatan, adalah biaya pemeriksaan kesehatan untuk PMI ini mungkin bisa kita tekan. Yang kedua, tidak terlalu jauh dari kabupaten atau tempat dia. Misalnya, di NTB, jangan sampai dia di Bima sana, misalnya. Itu kasihan, itu panjang, enggak boleh. Nah kita mendekatkan pelayanan itu di PMI-nya itu, itu yang bisa kita lakukan.

Nah, termasuk soal asuransi tenaga kerja, apakah bisa di luar negeri. Asuransi kesehatan, *sorry*. Asuransi kesehatan hari ini tuh wajib memang oleh BPJS Kesehatan kita. Sampai hari ini, kita belum terealisasi BPJS bisa bekerja sama dengan mitra di luar negeri, sampai ini belum ada. Ada upaya-upaya ke sana, tapi belum berhasil. Nah, ini mohon dukungannya nanti, kita coba pelajari undang-undang atau kemungkinan kita bisa menggaet mitra dari luar untuk kemudian bisa menangani, karena yang bisa ditangani dengan asuransi kesehatan yang ada, ya tentu hanya di sana, di dalam negeri. Nah, di luar negeri ini problem memang.

Yang bisa kita lakukan, tadi ada pertanyaan menarik, saya kira, adalah perjanjian bilateralnya kita perkuat. Perjanjian bilateral, misalnya di Taiwan itu. Di Taiwan itu, mereka sudah *cover* semua, Pak. Taiwan, Hongkong itu bagus, dari kepala sampai kaki, semua sudah *ter-cover*, tapi kalau di daerah Arab, di negara Arab, termasuk Malaysia itu belum. Nah, jadi, ini yang mungkin nanti perjanjian bilateral kita, kita perkuat. Jadi, yang banyak kita lakukan adalah perjanjian bilateral dan kontrak kerjanya kita perjelas. Itu termasuk menjawab Arab Saudi. Arab Saudi ini kita mau buka sebenarnya, tapi teman-teman serikat di Arab Saudi itu meminta yang kita patok 1.500 gaji awal itu turun menjadi 1.300. Nah, kalau 1.300 itu kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan, 5 juta setengah, itu ditawarkan lagi oleh mereka di Arab Saudi. Ini kalau kita biarkan, enggak kita negosiasi, bertahan di angka minimal 1.500 Riyal, saya kira kasihan.

Makanya, itulah alasan, salah satu alasan yang dipakai oleh naker sebelumnya untuk sampai sekarang belum buka, tapi Kementerian Tenaga Kerja itu sedang, 6 bulan ini, sudah melakukan evaluasi kira-kira ke depan seperti apa. Kita ingin sebenarnya buka, tapi kita gaji dan perlindungan penduduk lain, termasuk paspor ditahan oleh majikan. Dokumen ditahan oleh majikan, seperti pertanyaan Pak Zainul, itu nanti kita coba upayakan. Karena terbatasnya tenaga kita, kita pakai sistem elektronik. Jadi, pergerakan tenaga kerja kita itu, paling tidak, ada laporan seminggu sekali kita tahu, paling tidak.

Jadi, harus ada literasi soal digital ke mereka, Pak, sebelum berangkat, bukan hanya bahasa. Literasi soal digital, literasi soal keuangan, itu penting, Pak. Ini yang mau kita dorong menjadi bagian dari kurikulum yang ada. Mungkin dalam jangka panjang, yang menarik itu sebenarnya adalah kita harus punya pemetaan *job order*, seperti yang disampaikan Pak Sitorus tadi sama Abang kita dari Kendari.

Kita harus punya gambaran *job order* di semua negara, proyeksi *job order*. *Job order* itu nanti kita akan kerja sama dengan lembaga pelatihan, vokasi, baik di sekolah kejuruan maupun yang ada di sekolah perguruan tinggi maupun swasta punya. Anda melatih ini *job order*-nya, ini speknya, silakan. Kalau tidak begitu, kita akan selalu tersandar seperti ini. *Job order* datang, baru kita melatih. Negara lain sudah ngambil, ngirim, *job order*-nya sudah hilang. Jadi kita butuh bank SDM ke depan, tapi bank SDM ini harus betul-betul kita rencanakan agak serius.

Misalnya begini, sekolah kejuruan perikanan. Ini ada permintaan perikanan dari Norway, ininya apa sekian ratus, tapi dia punya spek keinginan seperti ini, kita kasih, kurikulummu nih, itu akan jauh lebih bagus. Jadi, lembaga-lembaga pelatihan jangka panjang ini harus kita bangun kerja samanya nanti.

Yang kedua, misalnya, soal vokasi ini, kalau bisa sih mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian. Saya tuh berpikiran bagaimana kira-kira kalau Dikdasmen itu ada kurikulum bahasa pilihan, selain bahasa Inggris dan bahasa Arab, mungkin, ya. Itu ada pilihan terutama yang sekarang ini membutuhkan banyak tenaga kerja terampil. Misalnya Korea, Jepang, Jerman, itu banyak butuh, Pak. Korea itu

permintaan tenaga kerja kita G2G itu bisa sampai 20 ribu. Sekarang aja, kita tahun ini 11 ribuan. Nah, kalau mereka sejak awal keluar dari SMA atau SMA lah ya, itu mereka sudah punya dasar-dasar bahasa yang negara yang mau dituju, nah tinggal kita poles sedikit, kita urus biayanya, kita berangkatkan. Termasuk kita lagi berpikir, bagaimana magang ini jangan jadi modus, karena magang itu bukan wilayah kami, Pak, magang itu wilayahnya pendidikan.

Jadi, kami, Pak Heru, itu tidak bisa (ucapan kurang jelas 02:00:23). Nah, rata-rata anak-anak berangkat ini alasannya magang, tapi terus kerja. Alasannya umroh, ziarah, tapi terus kerja. Nah, ini kita masih susah, karena kita coba nego ke Arab Saudi, misalnya. Arab Saudi bilang, kami enggak bisa, ini peraturan internasional, mengubah visa ziarah menjadi visa kerja. Sementara di kita ini ilegal keluarnya.

Jadi, ini memang masalah-masalah, tapi karena ini kementerian baru, saya mohon dukungannya, kita fokus-fokus dulu aja, supaya bisa tereksekusi. Jangan semua hal kita urus, bukan tidak urus, *sorry*. Kita fokus dalam beberapa titik yang kira-kira yang memang agak krusial dalam konteks perlindungan, dan agak krusial dalam konteks rehabilitasi, dan agak krusial dalam kontek *recruiting*. Itu aja mungkin, yang ke depan, yang menurut saya harus kita dorong.

Saya terima kasih, tadi rata-rata memberi masukan, baik Bu Irma, Bu Kinarsih ya? Kurniasih Mufida. Itu nanti akan kita susulkan SOTK. Kemudian, sebenarnya kalau Asta Cita sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini sudah ada SOTK-nya, mungkin enggak bisa kebaca ya, dibagi aja nanti, ya, enggak apa-apa dan saya kira terima kasih. Mohon dibantu, supaya paling tidak usulan dari teman-teman, ini yang usul teman-teman birokrasi ini, bisa betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan penempatan, perlindungan, dan perekrutan, dan kebutuhan menambah devisa. Jadi, mohon dukungan dari Bapak/Ibu dari Komisi IX.

Kalau Asta Cita, ini sedikit saja. Asta Cita itu yang pertama di Asta Cita 1, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM,” itu memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri. Itu sudah dari turunan dari Bappenas dan Men-PANRB yang menerjemahkan ini, ini soal hak asasi, hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 itu kan memang itu yang menjadi poin dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, di Asta Cita ketiga, “Meningkatkan lapangan kerja”, jelas kan, bahwa kalau kita mengirim banyak yang terampil dengan risiko eksploitasi sedikit, *insyaallah*, akan mengurai lapangan kerja yang ada di Indonesia. Yang tadi seperti disampaikan beliau-beliau, bahwa ya sebenarnya kalau kita bisa serap semua di dalam negeri, selesai urusan, PMI ini enggak ada, tapi kan faktanya memang masih banyak. Nanti enggak ada devisa, ya, tapi sebenarnya devisa ini makanya kita lengkapi dengan devisa bagi pekerja migran yang manusiawi. Jadi, jangan hanya devisa, nanti kita dihajar teman-teman masyarakat sipil, “Ini eksploitasi aja

ini,” nah, ini enggak boleh. Jadi, kami makanya pakai istilah meningkatkan kualitas yang manusiawi.

Lalu, yang ketiga...

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, Bu Ketua, ini mumpung bicara devisa.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, silakan, Bu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Jadi, izin ini, Pak Menteri, devisa teman-teman migran ini kan sudah sangat besar sekali.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Besar, besar.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Jadi, harusnya ada *earmark*-nya juga, gitu. Itu yang saya titipkan, nih, ke Pak Menteri. Saya percaya, mudah-mudahan, ada *earmarking*-nya lah, di devisa yang sekian, itu sekian persennya tuh harus untuk pekerja migran kembali. Nah, itu saya titipkan untuk itu.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Iya, saya setuju, Bu. Saya juga punya cita-cita itu.

Jadi, 227 triliun, 227 triliun kalau kita bisa skemakan kayak DBH, Dana Bagi Hasil, iya, kan? DBH itu, maka dia bisa kembali tuh. Kita minta ke Menteri Keuangan nanti, “Bu bisa enggak ini, dalam bentuk apa pun lah, tidak harus bentuk uang, mungkin bantuan vokasi, mungkin bantuan integrasi, usaha,” tapi kita harus ada itu. Nah, ini memang sudah menjadi, iya, purna misalnya, ini sudah menjadi cita-cita kita atau bisa jadi ada dana abadi yang bisa kita kelola untuk khusus kepentingan perlindungan buruh migran, ya, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, saya kira itu, ya, sebagai perkenalan ini lumayan saya lihat ini. Ya, jadi, nanti saya mohon waktu untuk berdiskusi lebih intens, supaya kita ambil fokus-fokus mana yang bisa kita kerjakan.

Saya menyadari, seperti yang disampaikan Bu Nihaya, kemudian Kak Irma tadi itu bahwa kami ini, satu anggaran kami tahun kemarin itu 495 miliar dengan pegawai sekitar 700, di sini, di sini yang di Jakarta, totalnya 1.400. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kan anggaran ini kuncinya di Komisi IX dan Banggar, serta Menteri Keuangan. Ini butuh kolaborasi dengan kita nanti.

Lalu, yang kedua, SDM. SDM kami ini, coba misalnya kalau yang biro apa tadi itu, yang akan pindah itu, penempatan dari Direktorat Penempatan yang akan pindah itu, di sana itu ada 70 orang. *Statement*-nya teman-teman tenaga kerja, yang pindah itu hanya regulasi dan fungsinya, orangnya tidak. Berarti, anggarannya juga tidak. Nah, jadi, bayangkan sebesar itu, sepenting itu, penempatan ini kita harus rekrut baru.

Nah, saya lagi mau mencoba melakukan negosiasi. Nah, tapi ini juga ada kaitannya dengan Bapak/Ibu sekalian, karena Komisi IX mitranya Naker juga. Saya berharap, tidak ada hubungan yang tidak baik dengan Naker, kita akan jaga itu, karena semua kita ini satu badan semua, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tapi saya akan coba minta kepada Men-PANRB, teman-teman yang di sana ini dikasih pilihan. Kalau dia mau ke kementerian ini, diberi ruang, tapi kalau dia mau bertahan di sana, ya silakan. Itu mungkin salah satu kompromi yang bisa kita tawarkan untuk... Iya, jangan rebutan, lah, enggak menarik. Jadi, yang mau pindah, diberi ruang, jangan dilarang, tapi yang enggak mau pindah, ya silakan, tidak ada masalah. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk sebagai konsensus, kompromi, lah.

Jadi, saya kira, Bapak/Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Wakil Menteri ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Dari kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Luar biasa apresiasi Bapak/Ibu sekalian, masukan-masukan ini kami catat, sesuai dengan komitmen kami bahwa kami sangat butuh masukan untuk memperkaya program-program kami ke depan, baik 1 tahun maupun 5 tahun ke depan.

Saya kira, kementerian ini dengan Komisi IX adalah mitra, dan yang disampaikan oleh Bu Nihaya nanti, yang soal *call center*, nanti kita akan bentuk PIC khusus atau semacam tim khusus, yang khusus berkomunikasi dengan pihak luar, termasuk Komisi IX untuk membantu penyelesaian agregasi penyelesaian masalah-masalah yang lahir akibat ini. Masalah-masalah yang timbul dari masalah perlindungan.

Nah, memang problemnya, Bapak/Ibu sekalian, ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan. Kadang-kadang mereka keluaranya enggak lewat kita, tapi kena masalah di sana, kenanya ke kita, Bu. Ini problemnya di sini. Sama, kan, di komisi juga sama. Jadi, ini nanti coba kita ini lah. Itu ini Sestama laporan kemarin, utang di Rumah Sakit Polri, karena harus membantu masyarakat kita ini 6 miliar, 6 miliar. Nah, itu anggarannya sudah segitu, diambil lagi 6 miliar untuk seperti itu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terutama pintu-pintu masuk, ya.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Kasihaniilah kami, Bapak/Ibu sekalian.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya baik, terutama pintu-pintu masuk.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pintu masuk, Bu, iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, baik.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih atas jawaban.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, Bu Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Bu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin, saya mau tanya aja, sih. Ini undang-undang soalnya mumpung, kan lagi diminta ngumpulin proleg nih, ya. Komisi IX kan kemarin tidak memasukkan untuk meninjau, yang undang-undang PMI, iya. Dengan perubahan ini, perlu perubahan undang-undang enggak sebenarnya? Berarti revisi itu, berarti mungkin itu, masuk di kesimpulan kalau memang perlu direvisi. Nanti jadi dari sini di *end off* (02:09:58), dari sana mengusulkan gitu, kan, jadi saling sinergi.

Itu aja, sih, mungkin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, baik.

Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, kesimpulan sementara kita, saya akan bacakan. Untuk internal, biar internal Komisi IX, biar memperhatikan poin yang akan ditampilkan.

Saya akan membacakan, kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Rabu 30 Oktober 2024.

1. Dalam menjalankan visi presiden, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk:
 - a. Melakukan pemantapan transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian termasuk perubahan nomenklatur dan struktur organisasi, tata kelola, anggaran, dan program;
 - b. Menyusun program 100 hari dengan indikator yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan visi presiden dalam pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - c. Menyusun peta jalan arah kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia 5 tahun ke depan yang dilengkapi dengan data dan sistem informasi kebutuhan dan ketersediaan jenis pekerjaan di negara penampatan.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI segera menuntaskan pemetaan permasalahan pekerja migran Indonesia dalam menyusun program prioritas dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Mengkaji kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja

- Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
- b. Perbaikan program perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya Program Jaminan Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Kesehatan;
 - c. Peningkatan peran atas ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan di luar negeri;
 - d. Penertiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI agar tunduk terhadap regulasi perlindungan pekerjaan migran Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam penataan dan perbaikan tata kelola pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia, termasuk memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran dapat berjalan optimal.
 4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 6 November 2024.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota, adakah dari poin-poin yang sudah disampaikan, adakah yang ingin menambahkan atau menyempurnakan? Kami persilakan.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, silakan, Pak Ashabul.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Hanya 2, nomor 2a tadi tuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

2a?

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Iya, coba dilihat.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, silakan, Pak.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

“Mengkaji kembali Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan,” ya. Umumnya, tenaga kerja perorangan itu kan biasanya orang-orang profesional, dia merangkap, yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di sana, sehingga menurut saya enggak perlu dibatasi kalau mereka, kalau pengguna perseorangan. Maksudnya itu kan biasanya kerja di tambang, kerja di perusahaan-perusahaan otomotif, dan sebagainya, itu. Kalau PT itu yang enggak boleh, tapi kalau PT saya enggak setuju, kalau PT pembantu rumah tangga, tapi kalau yang dimaksud tenaga perseorangan yang profesional, saya kira enggak apa-apa, kita dorong. Kalau saya, saran saya.

Kalau pembantu rumah tangga yang dimaksudkan, kalau saya, jangan dikaji, Bu. Enggak usah, biarin aja dulu, karena berkali-kali kita membuat perjanjian bilateral, berkali-kali pula Arab Saudi itu langgar itu perjanjian. Zamannya Pak Muhaimin jadi menteri, itu gitu juga. Kemudian penggantinya Pak Muhaimin dibuat lagi MoU, dia langgar lagi itu, Pak, Arab begitu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Kalau itu yang dimaksud.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Pak Ashabul.

Jadi, ya, mungkin karena, Pak, dari Komisi VIII, ya, ini bagian dari perlindungan sebetulnya. Jadi, ini sebetulnya lebih ke PRT, Pak, ya lebih ke PRT, tapi itulah yang dibutuhkan bagaimana pemerintah hadir untuk melindungi mereka sampai di negara penempatan, agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi, Pak. Seperti itu.

Ada lagi yang lain? Poin satu.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Bu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Iya, nomor 2c, ya. Saya tadi kan Bu Nini juga menyampaikan kalau Atase Ketenagakerjaan itu apakah menjadi yang akan diprioritaskan saat ini. Sementara itu kan ada kaitannya sama Kemenlu, Kemenaker, gitu, ya. Mungkin di-*drop* dulu, nanti sambil di perjalanan. Kan ini rapat masih baru awal kan dengan Pak Menteri kan, masih ada panjang rapatnya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Cuma kalau dari awal udah kayak gini kan, jadi kan ada target memberatkan kementerian juga, gitu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya sudah, di-*drop*. Cukup, Bapak/Ibu sekalian?

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Izin. Bu Ketua, izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Siapa, ya?

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Saya, Bu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh, iya.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Tadi ada ide dari Bu Kurniasih soal, kami kayaknya butuh dukungan revisi Undang-Undang 18 itu.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Iya, ini baru mau disampaikan. Nanti Pak Menteri ada jatahnya, Pak, caranya nanti ada jatahnya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ini masih perdana.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Iya yang berikutnya tentang undang-undang. Kalau memang ini mau direvisi, karena sudah berubah jadi kementerian, kan logikanya harusnya berubah, ya, tugas, fungsinya, dan sebagainya. Itu mungkin perlu didorong untuk adanya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ya, kalau enggak salah.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ini masuk ke poin 3, ya?

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Ini kan pelaksanaan, berarti pelaksanaan atau mau direvisi, atau pengkajian kali, ya, mengkaji.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Mendorong atau langsung.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):

Mengkaji kalau memang perlu direvisi, direvisi. Kita juga belum tahu, nih, di Baleg nanti dibahas atau enggak.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Itu saya perlu saya laporkan, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kita informasi bahwa bagi kementerian yang mau melakukan revisi, karena mungkin ada peningkatan status dan sebagainya, akhir bulan ini ditunggu draf revisinya untuk masuk Prolegnas.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh, berarti udah masuk, ya.

F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Bu Nini.

F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Jadi kalau nanti, mohon maaf, Pak Menteri. Biasanya kalau di Komisi IX itu pertama, draf kesimpulan itu untuk dirapatkan keputusan dulu di internal anggota, habis itu baru diberikan ke Pak Menteri untuk memberikan tanggapan. Jadi, menurut saya, karena itu sudah oleh Kementerian Hukum sudah digerakkan dan sepertinya di *long list*-nya sudah ada. Di *long list* di Prolegnas sudah ada, jadi, kita yang pendorong saja, pemerintah mengajukan. Sudah, ya? Sudah diganti ya? Mendorong pemerintah, ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, poin tiga.

F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Iya, iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya. Bapak/Ibu, cukup ini?

Baik, kesempatan ini kami berikan kepada Pak Menteri untuk melihat kembali apakah ada yang mau ditambah atau dikurang. Silakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Pada prinsipnya, kami setuju semuanya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Karena ini adalah kesimpulan kita adalah mengikat, jadi, kalau sudah dibilang setuju, berarti ini kita akan tagih. Ya, Komisi IX akan tagih di kemudian hari.

Baik, terima kasih atas masukan dan saran. Apakah rumusan kesimpulan ini dapat disetujui, Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian, rumusan kesimpulan dapat disetujui menjadi keputusan rapat pada hari ini dan akhirnya kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IX mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bilamana ada hal yang kurang berkenan. Sebelum rapat kami akhiri, kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan sepatah dua kata kalimat penutup. Kami persilakan.

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, Bu Ketua.

Yang pertama, tentu kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas masukan, kebaikan dari Bapak/Ibu Anggota DPR yang terhormat pada hari ini, dan *insyaallah* seluruh catatan-catatan dan usulan yang berkembang hari ini akan kita jadikan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari perubahan-perubahan atau revisi-revisi yang akan kita lakukan di kementerian kami. Sekali lagi, kalau di dalam

penyampaian ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk itu, saya kira itu sebagai bagian dari kata penutup kami. Mohon maaf atas segala kurang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Sebelum rapat saya tutup, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.

(RAPAT: BERDOA)

Doa selesai. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om shanti shanti om,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan,
Selamat sore.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.19 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**